



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan wewenang Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut dengan RAD-PG adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD-PG dimaksudkan untuk menjadi panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, swasta, BUMN/ BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan RAD-PG meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi setiap wilayah agar:
 1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;
 2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi;
 4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi;
 - b. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah;
 - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara

terpadu untuk implementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;

- d. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD-PG dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ANALISIS SITUASI
BAB III	: RENCANA AKSI MULTI SEKTOR
BAB IV	: KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI
BAB V	: PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VI	: PENUTUP
	LAMPIRAN

- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal dua kali setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode RAD-PG.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12-06-2023

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 13-06-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H.HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI BENGKULU Tahun 2022-2024

**BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 dapat diselesaikan. Penyusunan RAD-PG Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2021-2024.

Tujuan umum dari penyusunan RAD-PG ini adalah sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Provinsi Bengkulu. RAD-PG diharapkan dapat dijadikan pedoman pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu lintas sektor, bertahap dan berkesinambungan, serta terukur keberhasilannya. RAD-PG ini merupakan panduan, arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan-evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Saya berharap RAD-PG Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 ini agar segera ditindaklanjuti melalui program/kegiatan di instansi provinsi maupun kabupaten dan kota. Marilah kita bersama-sama berpartisipasi serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Bengkulu serta pada akhirnya nanti diharapkan dapat mewujudkan Visi : ***“Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera dan Hebat”***.

Bengkulu, 2022

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	4
1.3. Tujuan Penyusunan	6
1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG	7
BAB II ANALISIS SITUASI	
2.1. Situasi Pangan	9
2.2. Situasi Gizi	23
2.3. Tantangan	40
2.4. Telaah Kebijakan Provinsi	42
BAB III RENCANA AKSI MULTI SEKTOR	
3.1. Tujuan dan Sasaran	46
3.2. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	48
BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI	
4.1. Strategi dan Aksi	52
4.2. Pengorganisasian	56
4.3. Pembiayaan	57
BAB V PEMANTAUAN , EVALUASI DAN PELAPORAN	
5.1. Pemantauan dan Evaluasi	58
5.2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	59
5.3. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi	59
BAB VI PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	v
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	11
Grafik 2.2	Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan (ton/ha) Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	11
Grafik 2.3	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan (ton) Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	11
Grafik 2.4	Perkembangan Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	12
Grafik 2.5	Persentase Ketersediaan Energi pada Kelompok Pangan Nabati dan Hewani Tahun 2017-2021	12
Grafik 2.6	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari) Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021	13
Grafik 2.7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	13
Grafik 2.8	Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi Bengkulu (kg) Tahun 2017-2021	16
Grafik 2.9	PPH Konsumsi Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	17
Grafik 2.10	Persentase Berat Badan Lahir Rendah Provinsi Bengkulu Tahun 2021	23
Grafik 2.11	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	24
Grafik 2.12	Persentase Bayi Mendapat IMD menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2021	25
Grafik 2.13	Trend Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Tahun 2017-2021	25
Grafik 2.14	Persentase Balita 6-59 Bulan Mendapat Kapsul Vitamin A Tahun 2021	28
Grafik 2.15	Persentase Remaja Putri Mendapat TTD menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	29
Grafik 2.16	Persentase Ibu Hamil KEK menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	30

*Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu
Tahun 2022-2024*

Grafik 2.17	Persentase Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan Menurut Kabupaten/ Kota 2021	30
Grafik 2.18	Persentase Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan Menurut Kabupaten/Kota 2021	31
Grafik 2.19	Trend Ibu Hamil KEK yang Mendapat PMT Tahun 2017 – 2021	32
Grafik 2.20	Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	32
Grafik 2.21	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Provinsi Bengkulu Tahun 2021.....	35
Grafik 2.22	Persentase Penderita Diabetes Mellitus (DM) Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Provinsi Bengkulu Tahun 2021	36
Grafik 2.23	Persentase Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	39
Grafik 2.24	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	9
Tabel 2.2	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021	14
Tabel 2.3	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	15
Tabel 2.4	Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	15
Tabel 2.5	Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Provinsi Bengkulu Tahun 2021 berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020	17
Tabel 2.6	Capaian Konsumsi Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021	18
Tabel 2.7	Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2020-2021	22
Tabel 2.8	Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	26
Tabel 2.9	Jumlah dan Persentase Bayi diberi ASI Eksklusif di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	27
Tabel 2.10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	27
Tabel 2.11	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	34
Tabel 2.12	Persentase Sarana Air Minum Yang dilakukan Pengawasan Tahun 2021	36
Tabel 2.13	Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	37
Tabel 2.14	Desa yang Melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2021	38
Tabel 3.1	Outcome RAD-PG Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024	46
Tabel 4.1	Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Posisi RAN-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs.....	5
Gambar 2.2	Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Sejalan dengan perkembangan, saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multi sektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK, perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi pada usia bayi dan balita mengakibatkan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik, meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular saat dewasa dan lansia, serta berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh fluktuatif selama kurun waktu tahun 2017-2020. Pada tahun 2019 perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,96 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, angka ini masih lebih rendah karena pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2020-2021, akibat pandemic Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020.

a. Peran Pangan dan Gizi terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sumber daya ekonomi di Provinsi Bengkulu dari sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan energi. Pemanfaatan SDA Bengkulu lebih banyak pada tingkatan barang mentah dan barang setengah jadi. Proses hilirisasi SDA, terutama yang menjadi komoditas unggulan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sehingga, ekonomi Bengkulu relatif rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selain itu, terkait ketahanan pangan, stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan atau permukiman telah mengancam kemandirian pangan Provinsi Bengkulu. Prioritas Pembangunan ketiga Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, dengan Program Prioritas : 1).Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan; 2).Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi; 3).Peningkatan investasi; 4).Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan, bertujuan agar pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian menjadi produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, investasi serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Untuk pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 dengan Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat, dirumuskan strategi pencapaian Misi. Strategi pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2026 disusun dengan memprioritaskan kepada pemulihan ekonomi pada tahun awal RPJMD, kemudian penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial untuk jangka pendek dan menengah, dan sejalan dengan upaya

implementasi adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, dengan tetap optimis dalam mewujudkan visi dan misi.

Pembangunan bidang pangan di Provinsi Bengkulu dalam RPJMD termuat pada Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif dan misi 2 : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan.

Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAD-PG 2021-2024 ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Provinsi Bengkulu.

b. Determinan Masalah Pangan dan Gizi

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. Masalah pokok yang dihadapi adalah perlu ditingkatkannya ketahanan pangan yang diukur dari Skor PPH, karena pada tahun 2020 adalah sebesar 82 untuk PPH Ketersediaan Pangan dan 82,6 untuk PPH Konsumsi Pangan.

Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

1. Terbatasnya stok cadangan pangan daerah
2. Panjangnya rantai distribusi pangan
3. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras

Masih banyak permasalahan baik pada aspek ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta kelembagaan ketahanan pangan yang perlu ditangani agar tujuan

pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu dapat terwujud. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Tingginya konsumsi beras untuk masyarakat provinsi Bengkulu, sehingga untuk konsumsi umbi- umbiannya masih rendah. Hal ini terlihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat konsumsi belum mencapai 100, yang artinya belum menunjukkan keragaman dan keseimbangan pangan. Keberagaman konsumsi pangan hewani, serta sayur2an dan buah masih dibawah ideal. Sedangkan untuk konsumsi beras masyarakat provinsi Bengkulu masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun.

Budaya masyarakat yang belum terbiasa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan bahan lain. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan tentang diversifikasi konsumsi pangan. Keberagaman konsumsi harus diimbangi dengan keragaman ketersediaan pangan, dimana berdasarkan PPH ketersediaan, pangan hewani dan sayuran/buah juga masih kurang. Sehingga perlu keseimbangan antara ketersediaan pangan dan konsumsi pangan

1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangandan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi nasional dan daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan tersebut. Posisi RAN/RAD-PG terhadap kebijakan strategis, strategi nasional/daerah dapat dilihat dalam Gambar 1 yang menunjukkan RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu Kepada RPJMN 2020-

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu
Tahun 2022-2024

2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi seperti Stranas Percepatan Penurunan Stunting, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas PUG melalui PPRG.

Gambar 1.1
Posisi RAN-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan
RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs



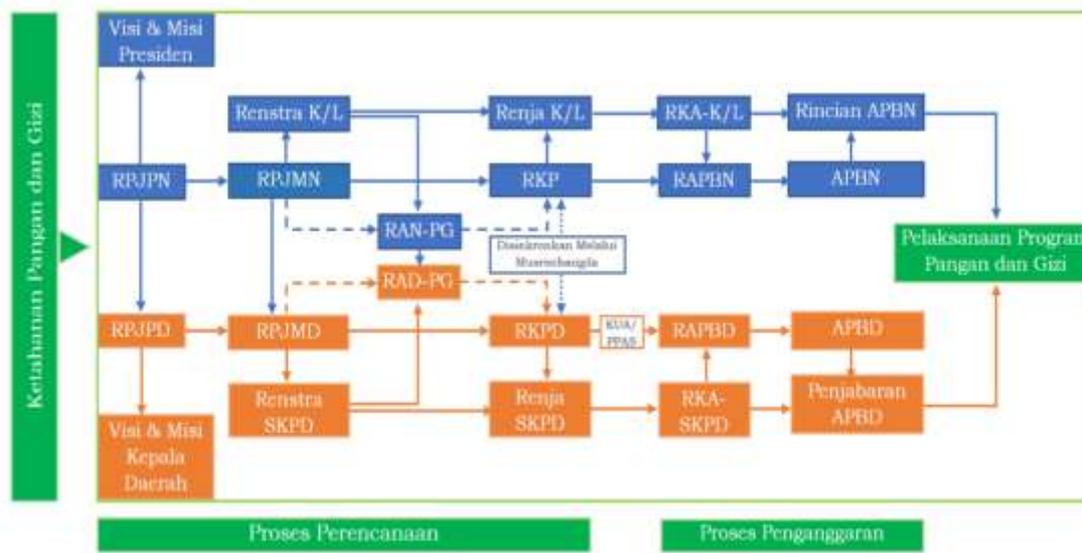
Keterangan

- : disinkronkan
- : mengacu

Sumber : RAN-PG Tahun 2021-2024

di daerah, RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra OPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja OPD dan RKPD. Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.2
Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber RAN-PG Tahun 2021-2024

Sebagai terjemahan dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD- PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan juga RPJMD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan umum dari penyusunan RAD-PG ini adalah sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Provinsi Bengkulu.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen RAD-PG tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di

setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten/Kota.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5).

BAB II ANALISIS SITUASI

Analisis situasi merupakan tahap awal yang dilakukan dalam proses perencanaan. Tujuan utamanya adalah melakukan penilaian atas situasi yang terjadi, dengan cara mengumpulkan, menganalisis data. Situasi disini ialah konteks yang menjadi fokus perencanaan program.

Pangan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia, sehingga ketersediaan, distribusi, dan akses pangan serta tingkat harga sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah (tingkat daerah/nasional). Bahan pangan yang cukup dan bergizi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

2.1. Situasi Pangan

Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sebanyak 2.032.942 jiwa terdiri dari 1.039.928 jiwa penduduk laki-laki dan 993.014 jiwa penduduk perempuan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	89.774	85.739	175.513
2.	5-9	88.764	85.093	173.857
3.	10-14	88.725	83.345	172.070
4.	15-19	88.610	82.839	171.449
5.	20-24	89.311	84.771	174.082
6.	25-29	87.956	84.230	172.186
7.	30-34	86.097	82.705	168.802
8.	35-39	81.501	78.360	159.861
9.	40-44	76.228	73.055	149.283
10.	45-49	68.287	65.230	133.517
11.	50-54	58.182	55.091	113.273
12.	55-59	47.710	44.779	92.489
13.	60-64	36.388	33.827	70.215
14.	65-69	25.857	24.337	50.194
15.	70-74	14.771	14.906	29.677
16.	75+	11.767	14.707	26.474
Provinsi Bengkulu		1.039.928	993.014	2.032.942

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022

Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, di antaranya urbanisasi dan peningkatan proporsi wanita masuk pasar tenaga kerja. Kuantitas atau jumlah kebutuhan pangan setiap tahun akan meningkat selaras dengan

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Urbanisasi yang merupakan salah satu dinamika kependudukan masih akan terus berlanjut dengan alasan dorongan keluar (*push factor*) dari sektor pertanian, karena sektor ini tidak dapat menampung angkatan kerja baru atau tidak dapat memenuhi harapan terkait upah yang diterima atau kondisi kerja yang dinilai tidak nyaman. Partisipasi angkatan kerja wanita juga meningkat. Hal ini akan memperkuat peningkatan permintaan untuk makanan jadi, baik yang dimakan di luar rumah maupun di dalam rumah.

Hasil analisis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu terhadap Bonus Demografi menggunakan proyeksi Penduduk dari Sensus Penduduk tahun 2010, Provinsi Bengkulu telah memasuki apa yang disebut dengan Bonus Demografi pada tahun 2015 dan pada masa tahun tersebut diproyeksikan fertilitas pada 2,3 rata-rata anakper Wanita Usia Subur dan akan memasuki masa Window Of Opportunity pada tahun 2026 suatu kondisi dimana wilayah bersangkutan masyarakatnya maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera, rentang masa panjang dari 2015 sampai tahun 2026 harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan berwawasan kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi catatan garapan serius bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu.

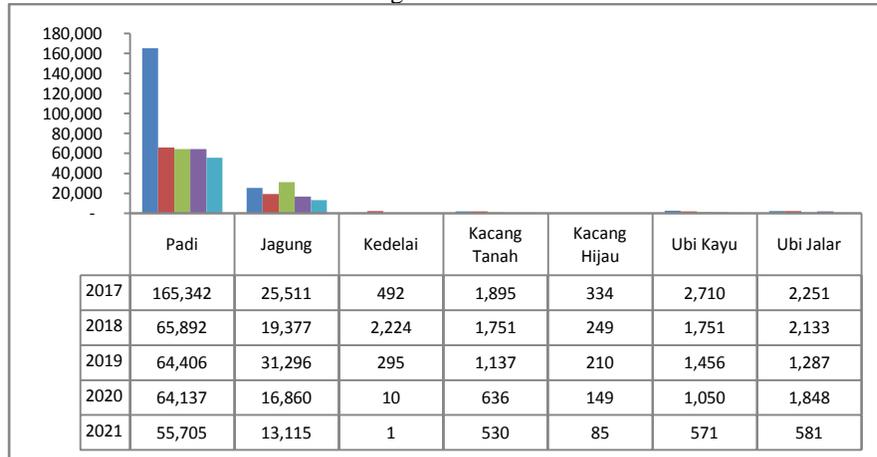
Ketersediaan pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, keterbatasan lahan pertanian dan dampak *global warming* akan mempengaruhi masa tanam dan bahkan akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas lahan. Produksi tanaman pangan di Provinsi Bengkulu menjadi hal paling penting untuk diperhatikan karena menyangkut bahan makanan pokok masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Pemantauan produksi tanaman pangan dilakukan pada tanaman sumber karbohidrat dan protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, antara lain: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau ubi kayu dan ubi jalar. Di samping itu bahan pangan strategis meliputi: telur, daging sapi, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, cabai merah, dan bawang merah.

Pada tahun 2021 produksi padi mencapai 217.711 ton, jagung 135.050 ton dan ubi kayu 29.427 ton merupakan hasil produksi tanaman pangan terbanyak di Provinsi Bengkulu. Sedangkan produksi tanaman pangan yang paling rendah adalah produksi kedelai yang menjadi sumber protein yaitu 6.5 ton. Luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan tahun 2017-2021 secara rinci adalah sebagai berikut :

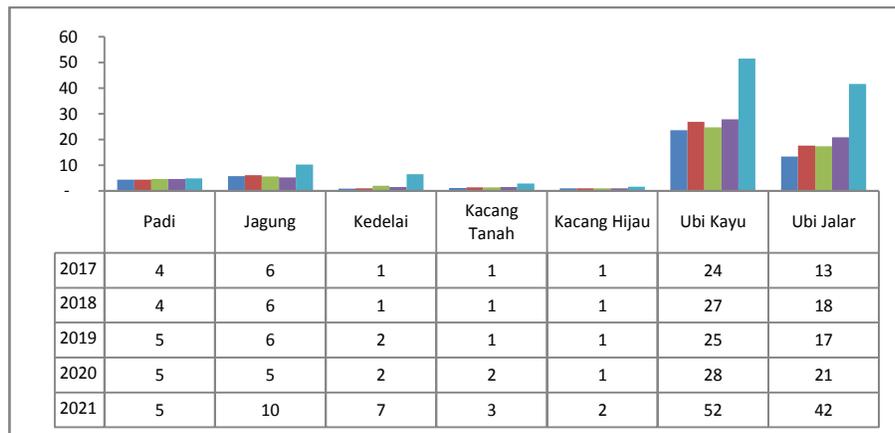
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu
Tahun 2022-2024

Grafik 2.1
Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021



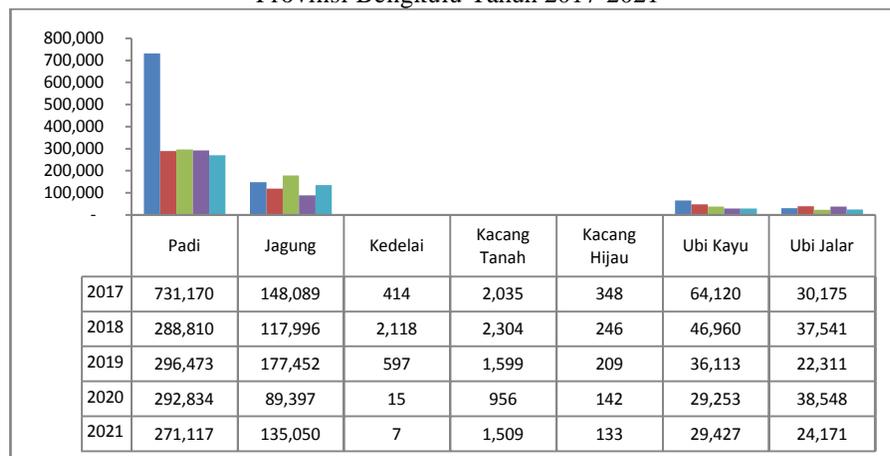
Sumber : DTPHP Provinsi Bengkulu, 2021

Grafik 2.2
Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan (ton/ha)
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : DTPHP Provinsi Bengkulu, 2021

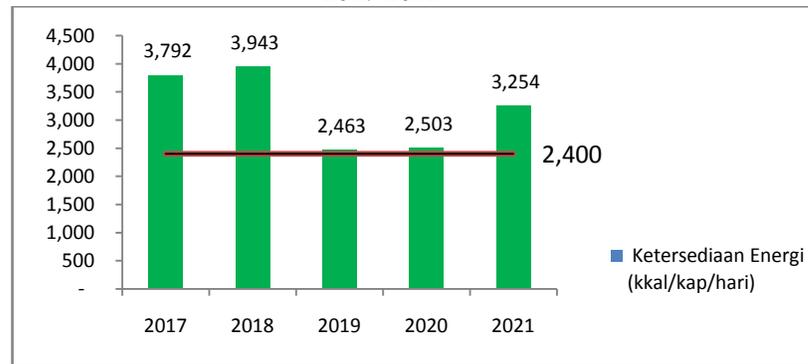
Grafik 2.3
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan (ton)
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : DTPHP Provinsi Bengkulu, 2021

Ketersediaan pangan penduduk setiap tahun tergambar dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Bengkulu. NBM merupakan tabel yang memuat informasi mengenai situasi penyediaan/pengadaan, penggunaan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.4
Perkembangan Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi di Provinsi Bengkulu secara kuantitas telah memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG 2012) yaitu sebesar 2.400 kkal/kap/hari, begitu juga dengan ketersediaan protein sebesar 63 gram/kap/hari. Ketersediaan energi meningkat dari tahun 2020 sebesar 2.503 kkal/kap/hari menjadi 3.254 kkal/kap/hari pada tahun 2021.

Ketersediaan energi pada kelompok pangan nabati memberikan kontribusi energi terbesar selama kurun waktu 2017-2021 dibandingkan dengan kelompok pangan hewani. Perkembangan kelompok pangan yang memberikan kontribusi energi terbesar dapat dilihat pada grafik berikut.

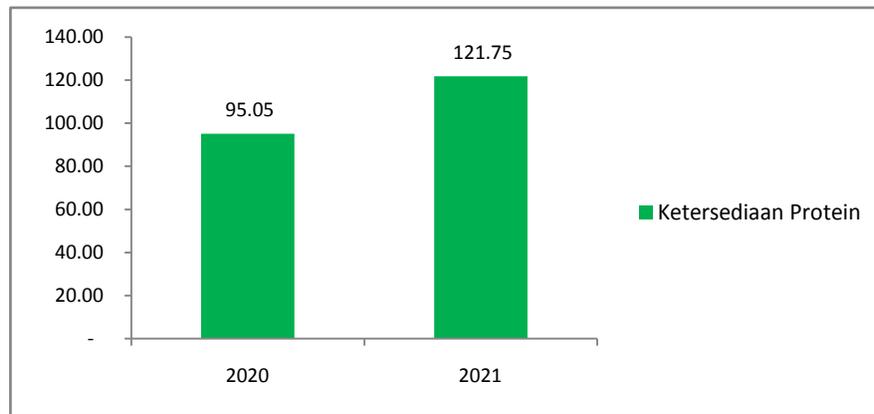
Grafik 2.5
Persentase Ketersediaan Energi pada Kelompok Pangan Nabati dan Hewani Tahun 2017-2021.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Demikian juga dengan ketersediaan protein 95,05 gram/kap/hari pada tahun 2020 menjadi 121,75 gram/kap/hari pada tahun 2021 seperti grafik di bawah ini :

Grafik 2.6
Ketersediaan Protein (gram/kap/hari) Provinsi Bengkulu
Tahun 2020-2021

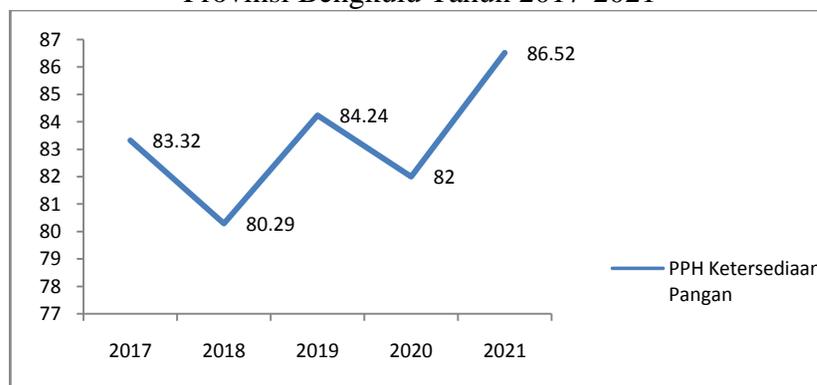


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan menunjukkan aspek kualitas atau mutu gizi dari ketersediaan pangan, skor PPH pada tingkat ketersediaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 82 menjadi 86,52, sedangkan skor PPH ideal adalah 100. Perkembangan PPH ketersediaan pangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk semakin beragam. Sementara itu untuk Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE) mencapai 135,6%, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Angka Kecukupan Energi Ketersediaan Pangan
Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Energi (kkal/kap/hr)	% AKE	Ideal	
				Energi (kkal/kap/hr)	% AKE
1	Padi-padian	1.083	45,1	1.200	50
2	Umbi-umbian	49	2,1	144	6
3	Pangan Hewani	711	29,6	288	12
4	Minyak & Lemak	372	15,5	240	10
5	Buah/biji berminyak	47	1,9	72	3
6	Kacang-kacangan	6	0,2	120	5
7	Gula	753	31,4	120	5
8	Sayur & buah	234	9,7	144	6
9	Lain-lain	-	-	72	3
Jumlah		3.254	135	2.400	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Berdasarkan skor PPH Ketersediaan Pangan dari tahun 2017-2021, skor PPH ketersediaan belum mencapai skor ideal yaitu 100. Skor PPH 100 merupakan skor ideal keberagaman ketersediaan pangan. Secara umum skor PPH Ketersediaan Pangan sudah cukup baik dan target yang ditetapkan setiap tahunnya tercapai, akan tetapi belum mencapai skor PPH Ideal. Untuk mencapai skor PPH Ideal, perlu untuk meningkatkan ketersediaan Umbi-umbian, Pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta gula.

Distribusi dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan yang ada agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat adalah dengan memastikan jalur distribusi pangan yang lancar sehingga pangan dapat diakses dengan mudah. Salah satu indikator keterjangkauan pangan masyarakat adalah harga pangan, dan harga pangan menjadi salah satu elemen penting dalam ekonomi dan berkontribusi terhadap inflasi. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan adanya gejala terganggunya distribusi pangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidacukupan pasokan pangan disuatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi pangan antar wilayah.

Adanya gejolak harga akan berpengaruh terhadap akses pangan masyarakat, dan apabila berlangsung secara terus menerus akan menimbulkan potensi terjadinya kerawanan pangan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengupayakan agar komoditas pangan strategis tetap stabil. Fluktuasi harga pangan selama kurun waktu tertentu diukur dari besarnya nilai koefisien

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

variasi (CV), semakin kecil CV maka harga akan semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perkembangan Stabilitas Harga Pangan Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2021

No	Komoditas	Koefisien Variasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras Premium	1,45	3,40	3,30	2,13	0,61
2	Beras Medium	1,87	2,65	3,21	2,61	1,11
3	Beras Termurah	2,48	3,80	4,37	2,60	
4	Jagung Pipilan Kering	5,76	8,22	3,98	4,26	
5	Kedelai Biji Kering	5,87	4,90	4,87	3,79	10,02
6	Gula Pasir Lokal	2,73	20,40	7,19	12,68	0,52
7	Bawang Merah	13,52	20,68	23,73	21,91	11,40
8	Cabe Merah Keriting	10,60	2,76	46,28	39,15	32,10
9	Daging Ayam Ras	4,75	11,26	9,68	9,08	5,65
10	Telur Ayam Ras	4,71	6,60	5,40	3,37	3,79
11	Daging Sapi Murni	2,20	2,50	3,09	0,78	0,98
12	Minyak goreng	1,40	2,44	2,80	2,40	11,83
13	Tepung Terigu	2,25	2,34	3,58	0,81	2,72

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa komoditas yang mengalami harga yang tidak stabil adalah gula pasir lokal, bawang merah, cabe merah keriting dan daging ayam ras.

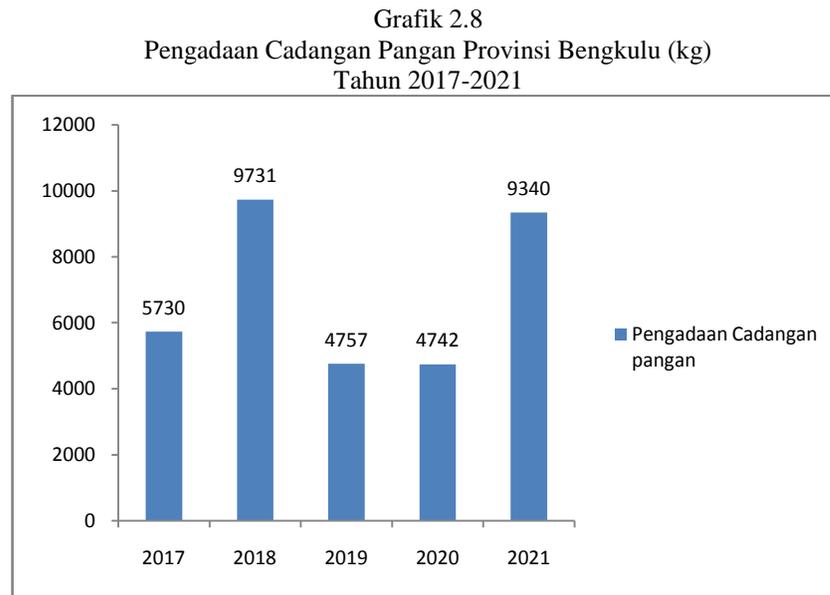
Selain stabilnya harga pangan upaya dalam menjaga keterjangkauan pangan, cadangan pangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah untuk menjaga ketersediaan pangan terutama beras. Provinsi Bengkulu melaksanakan pengadaan cadangan pangan selama kurun waktu 2017-2021, dan saat ini telah mencapai 61.618 kg beras yang disimpan di gudang Bulog Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.4
Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Stok Awal (kg)	36.608	36.236	45.967	48.684	53.426
2	Pengadaan (kg)	5.730	9.731	4.757	4.742	9.340
3	Penyaluran (kg)	6.102	0	2.040	0	1.148
4	Stok Akhir (kg)	36.236	45.967	48.684	53.426	61.618

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Perkembangan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Bengkulu dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2017-2021 belum mencapai jumlah cadangan beras yang harus disiapkan yaitu sebesar 200 ton. Cadangan pangan tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan akibat terjadinya kerawanan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, dan keadaan darurat lainnya. Sampai tahun 2021 cadangan beras baru dikeluarkan sebesar 9.290 kg.

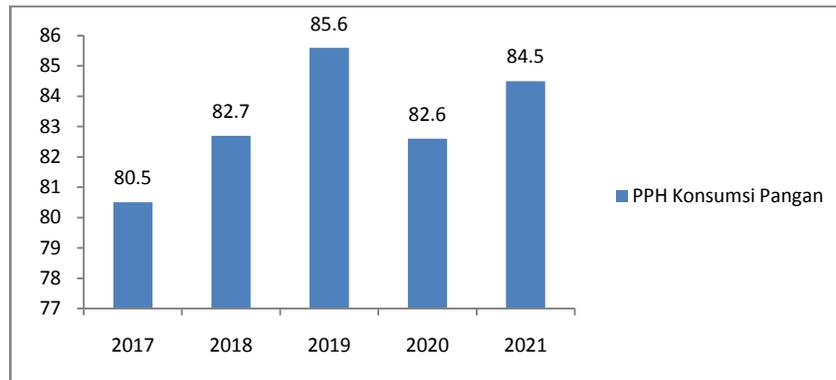
Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan

Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, tetapi jika dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman maka pembangunan ketahanan pangan belum tercapai karena belum sampai pada tingkat perseorangan. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sangat penting, kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi dan kualitas pangan dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor Pola pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan. Kualitas konsumsi pangan yang diukur dari skor PPH merupakan komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Provinsi Bengkulu dari tahun 2017-2021 memiliki skor PPH yang cukup baik. Kuantitas dan

kualitas konsumsi pangan Provinsi Bengkulu kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.9
PPH Konsumsi Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Konsumsi Energi dan Protein

Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, tetapi jika dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman maka pembangunan ketahanan pangan belum tercapai karena belum sampai pada tingkat perseorangan. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sangat penting, kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi dan kualitas pangan dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor Pola pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan. Kualitas konsumsi pangan yang diukur dari skor PPH merupakan komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.

Tabel 2.5
Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Provinsi Bengkulu Tahun 2021
berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020.

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/ Hari	Tingkat Konsumsi Energi		Tingkat Konsumsi Protein	
			Kkal/Kap/ Hari	% AKE*)	Gram/ Kap/Hari	% AKP**)
1	Padi-padian	312,6	1.259,6	60,0	28,9	50,8
2	Umbi-umbian	37,8	40,5	1,9	0,4	0,8
3	Pangan Hewani	117,2	211,6	10,1	19,7	34,6
4	Minyak dan Lemak	30,5	273,3	13,0	0,0	0,1
5	Buah/Biji Berminyak	10,3	55,4	2,6	0,5	0,9
6	Kacang-kacangan	15,2	37,6	1,8	3,7	6,5
7	Gula	19,9	73,8	3,5	0,1	0,1
8	Sayur dan Buah	277,5	113,6	5,4	4,4	7,7
9	Lain-lain	67,3	41,8	2,0	1,5	2,7
	Total		2.107,3	100,3	59,4	104,2

Sumber : Susenas 2020, diolah
Keterangan =

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

*) Angka Kecukupan Energi (AKE)

2.100 Kkal/Kap/Hari

***) Angka Kecukupan Protein (AKP)

57 Gram/Kap/Hari

Kualitas Konsumsi Pangan (PPH Konsumsi)

Capaian konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan Provinsi Bengkulu Tahun analisis 2020 dan 2021 berdasarkan kelompok pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Capaian Konsumsi Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021

No	Kelompok Pangan	PPH 2020 (data 2019)	PPH 2021 (data 2020)	PPH Ideal
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,0	1,0	2,5
3	Pangan Hewani	20,0	20,2	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	3,9	3,6	10,0
7	Gula	1,8	1,8	2,5
8	Sayur dan Buah	24,8	27	30,0
9	Lain-lain	-	-	-
	Skor PPH	82,6	84,5	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Skor PPH Konsumsi Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 (data 2019) dan tahun 2021 (data 2020) memiliki skor PPH yang cukup baik.

Perkembangan konsumsi pangan per kelompok pangan

Tercapainya target PPH konsumsi pangan adalah berdasarkan analisis data tingkat konsumsi Energi dan Protein Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (berdasarkan SUSENAS tahun 2020, BPS, diolah pada tahun 2021). Konsumsi energi masyarakat Provinsi Bengkulu sudah melebihi anjuran sebesar 2.107,3 kkal/kap/hari . Angka tersebut menunjukkan bahwa konsumsi energi penduduk sudah sedikit melebihi target konsumsi energi yang dianjurkan secara nasional sebesar 2.100 kkal/kap/hr, demikian juga dengan pencapaian protein ditargetkan 57,0 gram/kap/hari, pada tahun 2020 sudah mencapai lebih target yaitu sebesar 57 gram/kap/hari.

Guna mengungkapkan permasalahan konsumsi pangan pada tahun 2021 digunakan Analisis Konsumsi Pangan berdasarkan Susenas 2020, dengan membandingkan angka konsumsi Susenas 2020 dan target PPH Nasional. Selanjutnya pada uraian berikut penyajian data, pengungkapan permasalahan dan analisis diuraikan menurut kelompok bahan pangan.

1. Padi-padian

Konsumsi Padi-padian 1.259,6 kkal/kap/hari sudah melebihi standar ideal yang dianjurkan (1.000 kkal/kap/hari) atau sudah melebihi 259 kkal/kap/hari sehingga perlu diturunkan dan di diversifikasi. Tingkat Konsumsi Beras Penduduk di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebesar 99,5 kg/kap/tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Turunnya konsumsi beras Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa program diversifikasi pangan cukup sukses, dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dengan kandungan karbohidrat yang lebih sehat sudah meningkat. targetkan penurunan pangan beras itu harus diikuti dengan kenaikan konsumsi pangan lokalnya. Peluang diversifikasi besar karena masyarakat ingin hidup sehat dan terdapat peluang bisnis UMKM. Diversifikasi pangan bertujuan mengantisipasi krisis, penyediaan pangan alternatif, menggerakkan ekonomi dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dengan sasaran menurunkan ketergantungan konsumsi beras. Saat ini, setiap provinsi difokuskan memproduksi panganan lokal selain beras. Setidaknya ada enam komoditas pangan yang digenjut produksinya antara lain ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Karena itu, pola pangan harus diubah bahwa beras bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Selama ini, pemerintah masih terlalu fokus pada pengembangan pangan jenis beras. Padahal, Indonesia memiliki ragam jenis pangan yang sangat berlimpah. Pentingnya upaya untuk mendorong pasar guna memperkenalkan produk pangan lokal sehingga Menarik semua orang untuk mengkonsumsinya.

2. Umbi-umbian

Konsumsi Umbi-umbian 40,5 kkal/kap/hari masih berada dibawah standar ideal yang dianjurkan (120 kkal/kap/hr) sehingga perlu dinaikkan sejumlah 79,5 kkal/kap/hari. Peningkatan konsumsi umbi-umbian diperlukan untuk penganekaragaman pangan. Apakah beras dan terigu lebih unggul dibandingkan umbi-umbian? Setiap bahan pangan mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Penganekaragaman pangan diperlukan untuk saling melengkapi dan menunjang kebutuhan zat gizi dan komponen-komponen lain agar tubuh sehat dan bugar.

Pada umumnya umbi-umbian mengandung kadar karbohidrat yang tinggi dan protein lebih rendah dibandingkan dengan sereal. Karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, selama ini umbi-umbian hanya dikenal sebagai sumber kalori yang murah. Selain sebagai sumber kalori, umbi-umbian sebenarnya memiliki beberapa keunggulan antara lain mengandung komponen fungsional dan mikronutrien. Umbi-umbian juga mempunyai produktivitas yang tinggi, dapat tumbuh di daerah marginal dan tegakan muda sehingga dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur yang selama ini kurang dioptimalkan. Di Provinsi Bengkulu konsumsi umbi-umbian masih lebih rendah dari yang dianjurkan. Ini dapat ditingkatkan melalui Promosi Media Cetak, Media Elektronik dan bazar untuk mengenalkan pangan lokal serta Sosialisasi berupa praktek pengolahan hasil pekarangan yang berasal dari pangan lokal.

3. Pangan Hewani

Konsumsi Pangan Hewani 211,6 kkal/kap/hari masih berada dibawah standar ideal yang dianjurkan (240 kkal/kap/hr) sehingga perlu ditingkatkan konsumsinya sejumlah 28,4 kkal/kap/hari. Tingkat konsumsi masyarakat Provinsi Bengkulu akan protein hewani sudah bisa dikatakan baik. Konsumsi pangan sumber protein hewani dalam jumlah cukup diperlukan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan gizi, termasuk stunting. Terkait penyediaan pangan sumber protein hewani, Kementerian Pertanian memperluas sasaran swasembada dari hanya daging sapi menjadi protein hewani asal ternak. Sehubungan dengan itu, diperlukan informasi yang akurat terkait pola konsumsi kelompok pangan ini. Jenis pangan hewani yang banyak dikonsumsi adalah telur ayam ras, daging ayam ras dan Ikan Tongkol. Rata-rata konsumsi daging sapi/kapita sangat rendah dan angka partisipasi konsumsi juga rendah. Disarankan upaya pencapaian swasembada protein hewani dilakukan melalui intensifikasi peningkatan produksi dan pengembangan produk pangan asal ternak dan ikan, pengembangan prasarana dan kelembagaan pemasaran untuk memperlancar distribusi, menjaga harga wajar serta stabil, dan promosi yang intensif atas pentingnya makan sumber pangan protein hewani dalam konteks pola makan beragam bergizi seimbang dan aman.

4. Minyak dan lemak

Konsumsi 273,3 kkal/kap/hari sudah melebihi standar ideal yang dianjurkan (200 kkal/kap/hari) atau sudah melebihi 73,3 kkal/kap/hari sehingga sangat perlu diturunkan. Lemak dan minyak adalah bagian dari gizi seimbang yang dibutuhkan untuk hidup sehat. Akan tetapi, jenis lemak dan lemak total, jika dikonsumsi berlebihan, berisiko bagi kesehatan jantung. Untuk asupan lemak, beberapa studi menunjukkan bahwa asam lemak jenuh dikaitkan dengan risiko terjadinya penyakit jantung. Oleh karena itu dianjurkan untuk membatasi asupan lemak kurang dari 10 persen total energi, atau 7 persen untuk populasi yang berisiko tinggi.

Konsumsi lemak yang kurang maupun berlebih mempunyai dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. **Jika konsumsi lemak kurang** dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan imunitas terhadap penyakit.

5. Buah/biji berminyak

Unsur utamanya adalah minyak dan merupakan substitusi alternatif dan saling melengkapi terhadap kebutuhan minyak dan lemak. Konsumsi 55,4 kkal/kap/hari, masih dibawah standar ideal yang dianjurkan (60 kkal/kap/hari) atau kurang 4,6 kkal/kap/hari sehingga konsumsi perlu dinaikkan.

6. Kacang-kacangan

Konsumsi 37,6 kkal/kap/hari, masih berada dibawah standar ideal yang dianjurkan (100 kkal/kap/hr) masih perlu ditingkatkan sebesar 62,4 kkal/kap/hari, dalam bentuk diversifikasi berimbang antara kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang lainnya.

Kacang-kacangan yang merupakan kelompok bahan pangan yang mengandung kadar protein tinggi (nabati) diharapkan dapat mencukupi dan mengimbangi protein hewani. Protein nabati merupakan protein alternatif yang mudah diperoleh atau tingkat penyediaan cukup dan harganya cukup terjangkau. Semua ini dapat ditingkatkan penyediaannya dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan.

7. Gula

Konsumsi 73,8 kkal/kap/hari, masih berada dibawah standar ideal yang dianjurkan (100 kkal/kap/hr) masih berpeluang di tingkatkan konsumsinya melalui kegiatan diversifikasi sebesar 26,2 kkal/kap/hari, karena gula merupakan sumber tenaga untuk mendukung aktifitas yang dinamis, ini semua dapat ditingkatkan melalui informasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

8. Sayur dan buah

Konsumsi 113,6 kkal/kap/hari, masih berada dibawah standar ideal yang dianjurkan (120 kkal/kap/hr) sehingga perlu dinaikkan sejumlah 6,4 kkal/kap/hari, dalam bentuk Pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayur-sayuran.

Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral serta berfungsi sebagai zat pengatur yang berperan dalam proses pertumbuhan dan penglihatan, pemeliharaan jaringan dan peningkatan daya tahan tubuh terhadap penyakit serta sebagai anti oksidan. Di Provinsi Bengkulu, kebiasaan masyarakat dalam mengolah dan mengkonsumsi sayuran setelah dimasak, menyebabkan sayur tidak dapat diharapkan sepenuhnya sebagai sumber vitamin B dan C. Sumber vitamin diharapkan dari pangan buah, sedangkan sayur lebih diharapkan sebagai sumber serat. Kekurangan serat dapat menyebabkan pembuangan sisa-sisa makanan dalam tubuh terhambat dikeluarkan. Dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan penyakit kanker usus. Mengingat fungsi sayur dan buah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka konsumsi sayur dan buah di Provinsi Bengkulu masih kurang dari anjuran dan perlu ditingkatkan. Semua ini dapat ditingkatkan melalui penyampaian informasi berupa sosialisasi kepada masyarakat.

Keamanan dan Mutu Pangan Segar yang beredar (Pre-market dan Post-market)

Pengawasan pangan segar yang diedarkan di pasar dilakukan agar produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan parameter cemaran mikroba, kandungan residu

pestisida dan logam berat (dibawah BMR). Dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (1) pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*Pre Market*), (2) pengawasan keamanan pangan segar di peredaran (*Post Market*).

Pengawasan keamanan pangan di peredaran (*Post Market*) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Tim terhadap pangan segar yang beredar di pasar, dan yang tidak dapat disimpan lama.

Pengujian dilakukan secara kualitatif melalui uji cepat kandungan formalin dan pestisida. Indikator persentase tingkat keamanan pangan segar yang dikonsumsi diperoleh dari jumlah sampel yang diuji saat beredar di pasar (*Post market*). Masih banyak pangan segar yang beredar di pasaran mengandung pestisida, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pangan segar yang beredar.

Selain pengawasan pangan segar di pasaran juga dilakukan pengawasan keamanan pangan segar *Pre Market*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum diedarkan ke konsumen. Pengawasan dilakukan mulai di produksi, panen, grading, dan packing. Bentuk pengawasan keamanan pangan sebelum diedarkan yang dilakukan oleh OKKPD Provinsi Bengkulu adalah sertifikasi prima 3 dan PSAT.

Pada tahun 2020 dan 2021 telah diterbitkan sertifikat Prima 3 bagi pelaku usaha beberapa komoditi di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.7
Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2020-2021

Uraian	2020		2021	
	Jumlah sampel yang diuji	Jumlah sampel yang diuji	Jumlah sampel yang diuji	Jumlah sampel aman
Prima 3	15	15	7	5
PSAT	1	1	4	4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tercapainya target keamanan pangan segar adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan pestisida oleh petani sayuran dan buah belum mengikuti aturan penggunaan pestisida yang baik dan benar, sehingga pangan segar yang dikonsumsi masih ditemui kandungan pestisida yang dapat membahayakan bila dikonsumsi masyarakat.
2. Pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan segar yang aman dan baik masih kurang sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya pestisida.

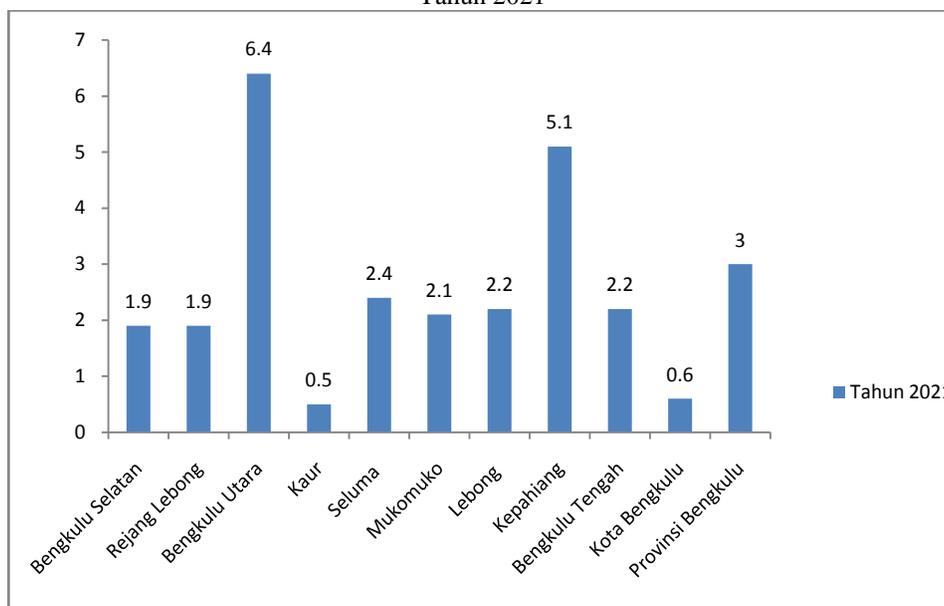
2.2. Situasi Gizi

Bayi Berat Badan Lahir Rendah

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena *intrauterine growth retardation* (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.

Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 tercatat sebanyak 34.298 bayi lahir hidup, ditimbang 33.075 bayi, dengan BBLR sebanyak 442 bayi (2,5%). Untuk penanganan bayi dengan BBLR meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi dan penanganan masalah pada BBLR yang diberikan di sarana pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah oleh tenaga yang berkompetensi. Cakupan BBLR selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.10
Persentase Berat Badan Lahir Rendah Provinsi Bengkulu
Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

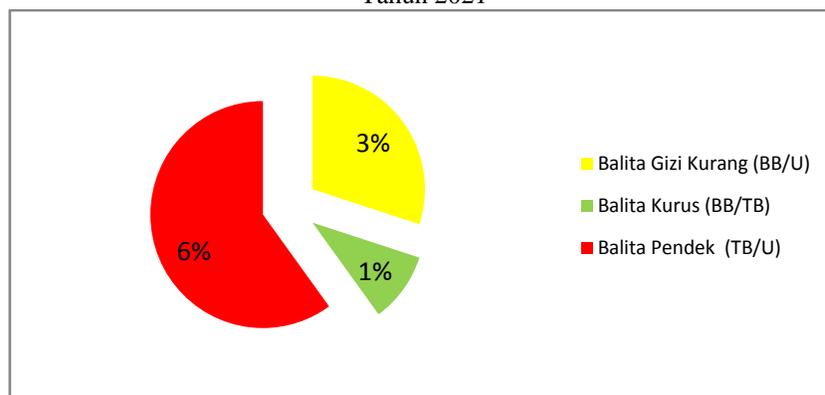
Persentase Balita Gizi Kurang (BB/Umur), dan Kurus (BB/TB)

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar World Health Organization (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Dari data rutin seksi Kesga dan Gizi Masyarakat tahun 2021 menyatakan bahwa persentase gizi kurang pada balita usia 0-59 bulan di Provinsi Bengkulu adalah 3%, sedangkan persentase balita pendek adalah 6%. Dan kategori balita kurus dan sangat kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Persentase balita sangat kurus dan kurus usia 0-59 bulan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 adalah 1%. Status Gizi balita berdasarkan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB dapat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11
Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB di Provinsi Bengkulu
Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan Persentase tertinggi adalah balita gizi pendek (*Stunting*) yaitu 6%.

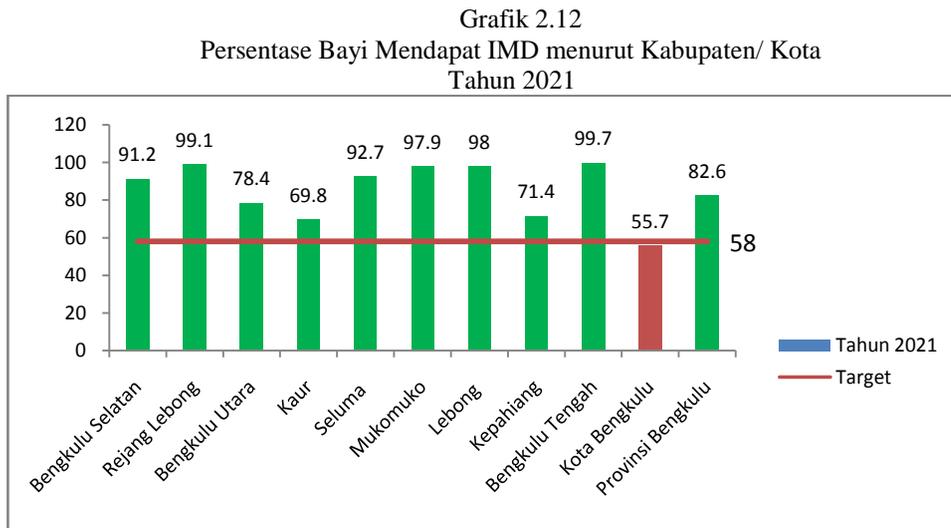
Bayi yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Pemantauan pemberian ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilakukan secara berkelanjutan. Berikut ini disampaikan pencapaian indikator kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Setiap bayi yang baru lahir idealnya harus mendapatkan IMD untuk memulai hubungan emosional antara ibu dan bayinya. IMD adalah suatu proses menyusui segera setelah lahir dengan cara bayi ditelungkupkan di dada ibu sehingga kulit ibu melekat pada mulut bayi minimal satu jam atau sampai menyusui awal selesai.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

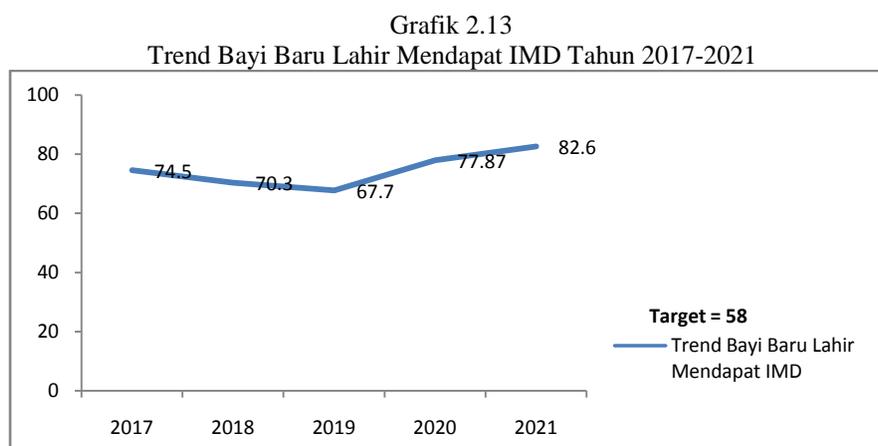
Tahun 2022-2024

Bayi baru lahir di Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 sebanyak 34.395 dengan kelahiran terbanyak ada di Kota Bengkulu sebesar 6.731 bayi. Idealnya setiap bayi yang lahir harus mendapatkan IMD dan persentase bayi yang mendapatkan IMD dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui persentase terendah bayi yang mendapatkan IMD ada di Kota Bengkulu sebesar 55.7 % serta tertinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 99.7 %. Namun demikian capaian secara keseluruhan di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sudah diatas target 58 %. Untuk melihat pencapaian program IMD kita bisa melihat capaian beberapa tahun belakang seperti tersaji dalam grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian bayi baru lahir yang mendapatkan IMD tahun 2020 yaitu sebesar 77,87%, menjadi sebesar 82.6% di tahun 2021.

Cakupan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) dan KN Lengkap

KN 1 adalah pelayanan kunjungan neonatal pertama pada 6-48 jam setelah lahir yang mendapatkan pelayan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. KN Lengkap adalah pelayanan kunjungan neonatal lengkap, minimal 3 kali yaitu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada 3 - 7 hari, dan 1 kali pada 8 - 28 hari yang mendapatkan pelayan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) di satu wilayah kerja.

Tabel 2.8
Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten/kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	KN1	PERSENTASE	KN LENGKAP	PERSENTASE
1	BENGKULU SELATAN	2.914	2.762	95	2.367	81
2	REJANG LEBONG	4.484	4.584	102	4.452	99
3	BENGKULU UTARA	5.467	4.798	88	4.742	87
4	KAUR	2.200	2.178	99	2.173	99
5	SELUMA	3.421	3.193	93	2.852	83
6	MUKOMUKO	3.757	3.352	89	3.149	84
7	LEBONG	1.846	1.820	99	1.696	92
8	KEPAHIANG	2.380	2.107	89	2.025	85
9	BENGKULU TENGAH	2.096	2.030	97	1.959	93
10	KOTA BENGKULU	6.233	6.114	98	5.929	95
JUMLAH PROVINSI		34.798	32.938	95	31.344	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Persentase Bayi diberi Asi Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini dan sebanyak mungkin sejak bayi dilahirkan hingga bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain, bahkan air putih sekalipun. Dengan kata lain, ASI eksklusif berarti hanya ASI sebagai makanan satu-satunya, tanpa tambahan apapun. Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi usia 0-6 bulan di Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebanyak 10.388 (68%). Pemberian ASI eksklusif menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Jumlah dan Persentase Bayi diberi ASI Eksklusif
di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI < 6 BULAN		
		JUMLAH	DIBERI ASI EKSLUSIF	
			JUMLAH	PERSENTASE
1	BENGKULU SELATAN	1.946	1579	81
2	REJANG LEBONG	1.807	1300	72
3	BENGKULU UTARA	2.223	1376	62
4	KAUR	705	642	91
5	SELUMA	1.292	772	60
6	MUKOMUKO	3.981	2602	65
7	LEBONG	393	250	64
8	KEPAHIANG	1.305	989	76
9	BENGKULU TENGAH	1.038	487	47
10	KOTA BENGKULU	647	391	60
JUMLAH		15.337	10.388	68

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI). Provinsi Bengkulu pelayanan kesehatan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

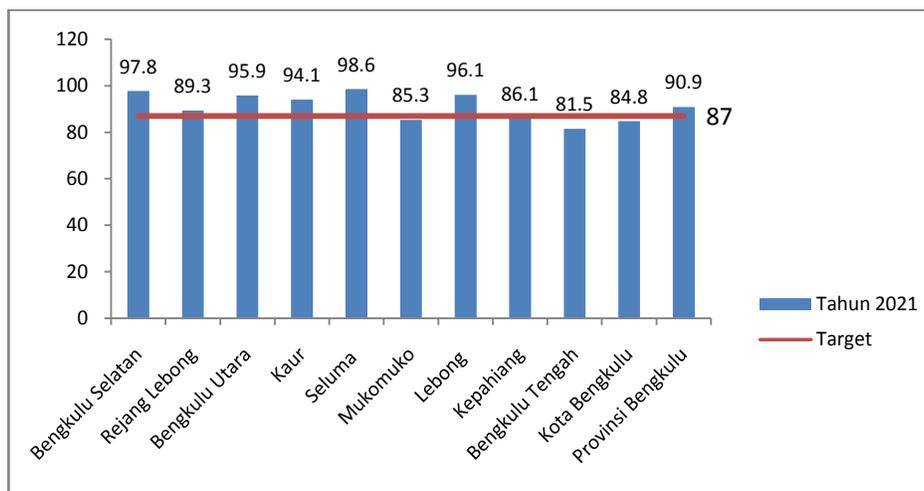
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI	PELAYANAN KESEHATAN BAYI	PERSENTASE
1	BENGKULU SELATAN	2.788	2975	107
2	REJANG LEBONG	4.322	3901	90
3	BENGKULU UTARA	5.342	5515	103
4	KAUR	2.106	2048	97
5	SELUMA	3.207	2742	86
6	MUKOMUKO	3.565	3338	94
7	LEBONG	1.692	1797	106
8	KEPAHIANG	2.289	2019	88
9	BENGKULU TENGAH	2.005	2004	100
10	KOTA BENGKULU	6.401	6092	95
JUMLAH		33.717	32.431	96

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Cakupan Pemberian Vitamin A

Vitamin A juga diberikan pada anak balita umur 6-59 bulan dan diberikan pada bulan februari dan agustus setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas ada 133.504 balita usia 6-59 bulan yang perlu diberikan Vitamin A. Balita terbanyak ada di Bengkulu Utara 23.522 menyusul Rejang Lebong 18.763 anak balita. Balita dibawah usia satu tahun diberikan kapsul vitamin A biru dan diatas satu tahun kapsul vitamin A merah. Persentase balita yang diberikan Vitamin A dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.14
Persentase Balita 6-59 Bulan Mendapat Kapsul Vitamin A Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Indikator program gizi selanjutnya adalah persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A. Vitamin A diberikan secara massal pada bulan februari dan agustus. Secara keseluruhan capaian provinsi Bengkulu sudah cukup baik yaitu sebesar 90.9 %, kabupaten Mukomuko, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu capaiannya masih dibawah 87%. Tahun 2021 adalah pertama kalinya penarikan data pencatatan pelaporan kegiatan gizi berbasis elektronik dengan memanfaatkan aplikasi e-ppgbm. Oleh karena itu data-data yang tersajikan dalam laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Pengadaan Vitamin A berasal dari droping dari pemerintah pusat berdasarkan jumlah sasaran proyeksi dan dapat mencukupi kebutuhan semua balita. Namun demikian kabupaten/ kota dapat mengadakan sendiri Vitamin A untuk mencukupi kebutuhannya sehingga obat yang berada di provinsi adalah merupakan buffer stok.

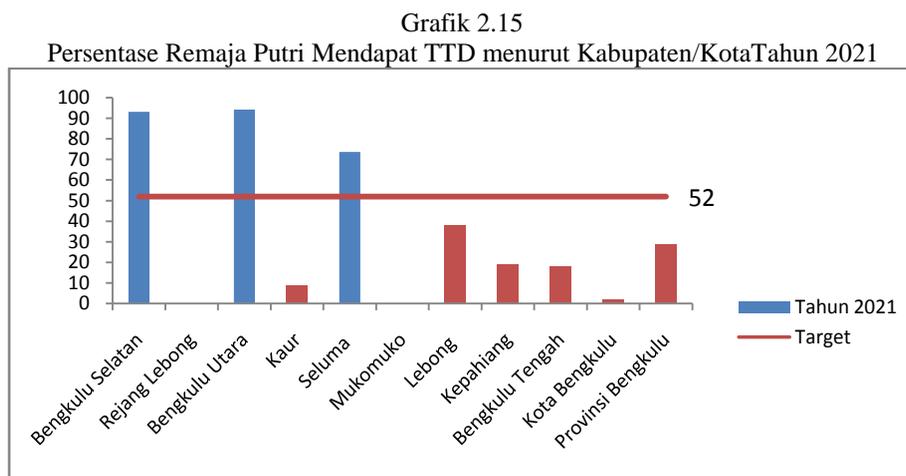
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

Pada usia anak sudah memasuki masa remaja/ pubertas sehingga diperlukan pemberian informasi dengan penyuluhan berupa kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi yang

benar, pengetahuan tentang HIV/ AIDS, NAPZA dan lain-lain. Pembagian Buku Raport Kesehatan Remaja diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan kesadaran gender. Pemberian Tablet Tambah Darah diperlukan pada Remaja Putri dengan tujuan mendapatkan calon-calon ibu yang bebas anemia. Konseling tentang gizi remaja juga diperlukan agar remaja tidak menjalankan cara diet yang salah.

Jumlah remaja putri di sekolah Provinsi Bengkulu yang terdata sebanyak 96.883 siswi, terbanyak ada di Kota Bengkulu sebanyak 22.859 siswi. Semua kabupaten/ kota telah tersosialisasi untuk memberikan TTD kepada siswi SMP dan SMA satu tablet seminggu. Target yang ditetapkan pemerintah cukup tinggi yaitu 52 %.

Kepatuhan remaja putri untuk minum TTD empat tablet sebulan masih belum tersosialisasi secara baik. Percepatan penurunan stunting dan wasting membutuhkan penguatan intervensi spesifik dan sensitif dengan berfokus pada sasaran 1000 HPK dan remaja putri. Perkembangan saat remaja sangat menentukan kualitasnya saat menjadi individu dewasa. Berikut ini capaian remaja putri yang mendapat TTD.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Capaian tingkat Provinsi secara keseluruhan masih sangat rendah yaitu sebesar 28.8% dari target 52%. Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat kedepan karena saat ini kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang mana pembelajaran siswi banyak dilakukan di rumah. Sementara status kesehatan remaja putri diharapkan tetap terjaga terutama dalam pemenuhan zat besi untuk mengatasi anemia.

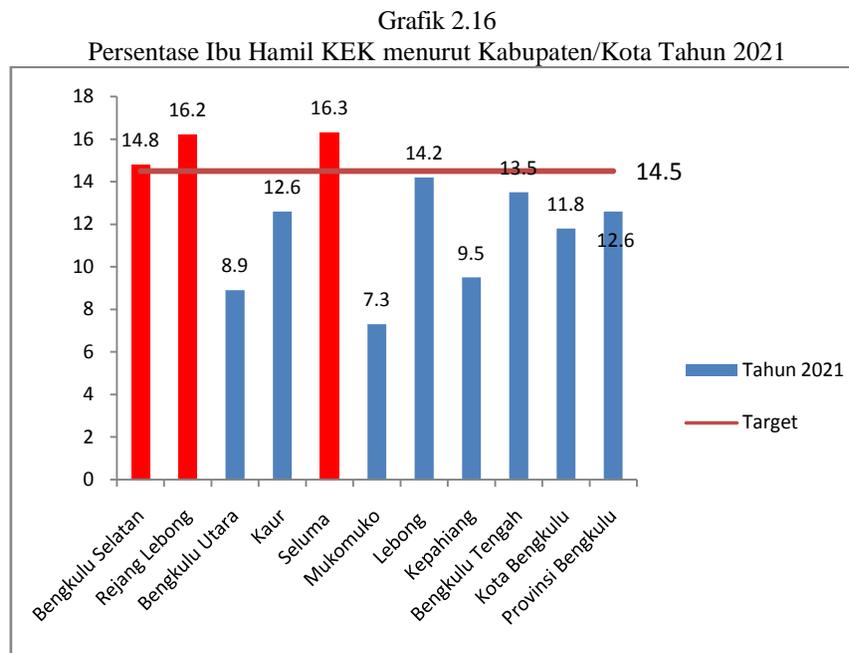
Ibu Hamil Mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)

Berdasarkan data tahun 2021 dapat dilihat ada tiga kabupaten yang ibu hamil yang mengalami KEK nya melebihi target yang telah ditentukan yaitu kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong dan Seluma. Meskipun secara rata-rata provinsi capaiannya sudah baik yaitu

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

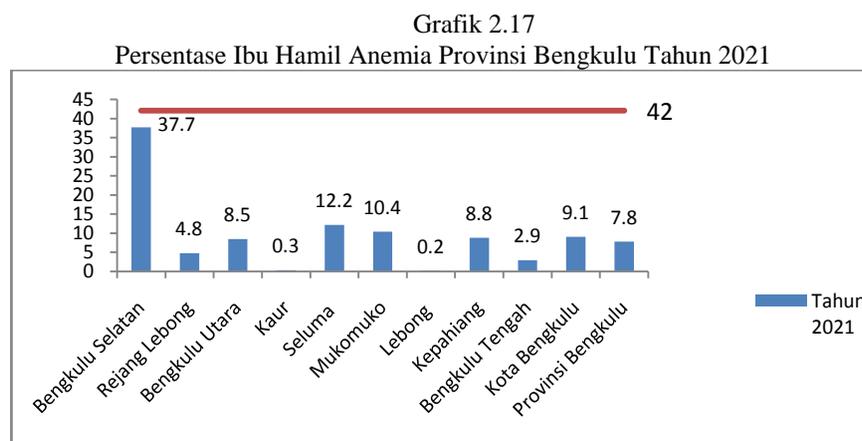
12.6%. Namun demikian perlu lebih diintensifkan kembali bimbingan dan monitoring khususnya tiga kabupaten yang masih merah raportnya



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Ibu hamil yang mengalami anemia

Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah ibu hamil menjadi anemia dan kekurangan energi kronis yaitu dengan pemberian Tablet Tambah Darah (Fe), Asam Folat dan asupan makanan yang cukup. Pemeriksaan kehamilan secara rutin juga penting dilakukan oleh ibu hamil agar dapat mendeteksi secara dini masalah dalam kehamilannya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Pemeriksaan anemia ini dengan mengukur kadar HB dari ibu hamil yang diperiksa sepanjang kehamilannya. Jumlah ibu hamil yang anemia juga berkaitan dengan keberhasilan pemberian TTD selama kehamilan. Berikut ini adalah persentase ibu hamil anemia.

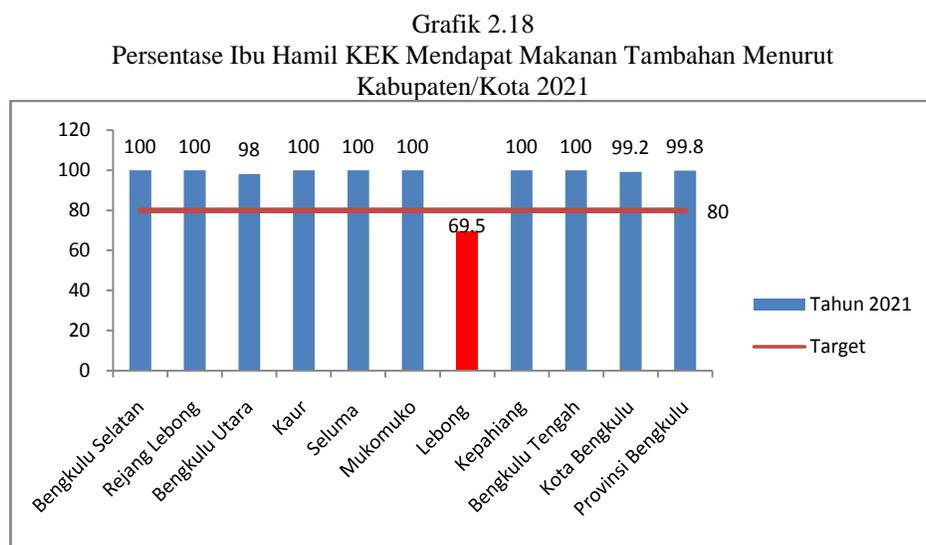


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Berdasarkan data diatas persentase ibu hamil anemia di Provinsi Bengkulu cukup rendah yaitu sebesar 7.8% jauh dibawah batasan maksimal yang ditentukan kementerian kesehatan yaitu sebesar 42%. Namun demikian ada satu kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian dengan lebih serius yaitu kabupaten Bengkulu Selatan dengan angka anemia 37.7% yang merupakan lokus stunting tahun 2021.

Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT

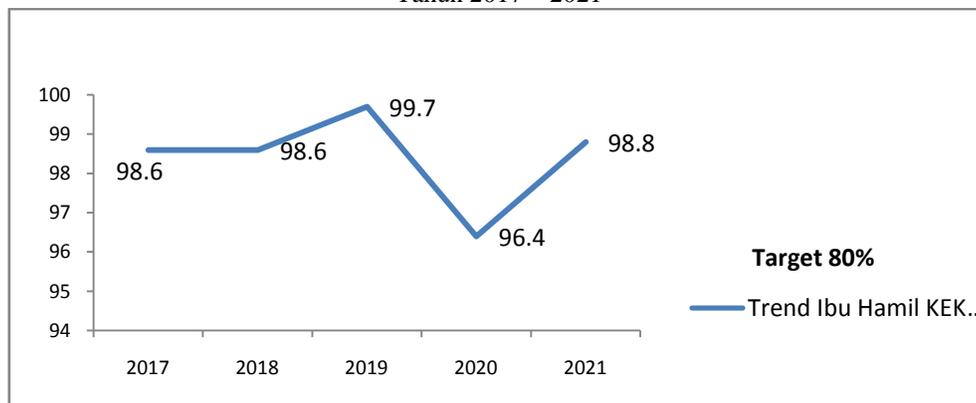
Pemenuhan kebutuhan PMT bagi ibu hamil KEK di tiap kabupaten/ kota hampir semua sudah terpenuhi. Hampir semua kabupaten kota telah memenuhi target dari kementerian untuk memenuhi 80 % kebutuhan PMT bagi ibu hamil KEK kecuali kabupaten Lebong yang masih 69.5%. Jika melihat data stock yang ada MT di kabupaten Lebong mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bumil KEK yang ada disana. Kemungkinan yang menyebabkan capaiannya menjadi rendah adalah karena pencatatan pelaporan tahun 2021 ini dengan menggunakan elektronik sehingga masih perlu dibimbing kembali agar kabupaten melakukan pencatatan dengan tepat di e-ppgbm. Persentase Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Ibu hamil KEK adalah hilir dari pelayanan yang diberikan kepada perempuan sejak dari masa remaja. Untuk perbaikan program kesehatan masyarakat ke depan perlu kolaborasi dan kerjasama dengan program lain untuk menangani masalah ini. Berikut ini adalah data trend ibu hamil KEK yang mendapat PMT tahun 2017 – 2021:

Grafik 2.19
Trend Ibu Hamil KEK yang Mendapat PMT
Tahun 2017 – 2021



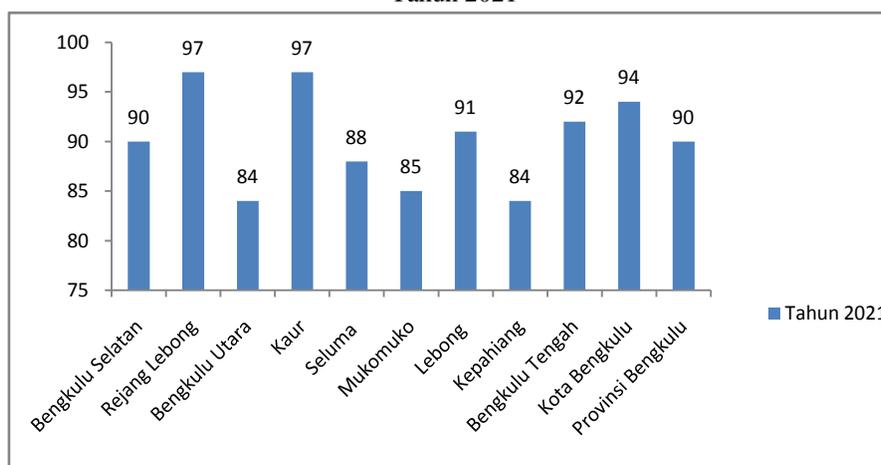
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Perkembangan ibu hamil KEK yang mendapat PMT sudah cukup baik dan mencapai target yang ditentukan yaitu diatas 80%.

Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setelah melahirkan dan setelah 24 jam pemberian vitamin A pertama adalah sala satu pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan, persentase ibu nifas mendapat Vitamin A dapat lihat pada grafik berikut:

Grafik 2.20
Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Provinsi Bengkulu
Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 jumlah usia produktif sebanyak 1.152.582, orang dengan rincian 581.852 orang laki-laki dan 570.730 orang perempuan. Yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 332.669 orang (23%), dengan rincian: laki-laki 136.800 orang (23%) dan Perempuan 195.869 orang (34%). Dan yang berisiko kesehatan sebanyak 134.388 orang (40%) dengan rincian Laki-laki sebanyak 53.836 orang (39%) dan Perempuan sebanyak 80.552 orang (41%).

Penerapan Puskesmas santun Lansia di Provinsi Bengkulu baru dimulai pada tahun 2016, dengan mengorientasikan kepada tenaga kesehatan tentang Puskesmas Santun Lansia. Pada tahun 2017 baru diperoleh beberapa Puskesmas santun Lansia di kabupaten/Kota. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun lansia sudah mencapai target Nasional Tahun 2021. Seluruh kabupaten/kota sudah menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia, dengan pencapaian 100% yaitu 179 puskesmas. Keberhasilan Pelaksanaan program ini karena sudah cukup banyak Tenaga Kesehatan yang orientasikan tentang Puskesmas Santun Lansia, dan adanya kewajiban untuk menerapkan di Puskesmas kabupaten/Kota, selain itu di beberapa Kabupaten/Kota mendapatkan dukungan dari pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait lainnya.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sarana Kesehatan adalah salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya Puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) beserta jaringannya, Rumah Sakit (baik RS umum maupun RS khusus), sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Posyandu dan Posbindu PTM).

Total Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 sebanyak 179 puskesmas, terdiri dari 53 puskesmas perawatan dan 126 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa penduduk, sedangkan di Provinsi Bengkulu satu Puskesmas melayani rata-rata 11.000 penduduk, artinya setiap 30.000 jiwa penduduk Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 2-3 Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 11.000 jiwa penduduk, dengan demikian di Provinsi Bengkulu saat ini masalah sarana puskesmas sudah tercukupi. Jumlah puskesmas dan jaringannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Jumlah Puskesmas dan Jaringannya di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas				Posyandu	Posbindu PTM
		Perawatan	Non Perawatan	Pustu	Pusling		
1	Bengkulu Selatan	5	9	37	12	15	13
2	Rejang Lebong	11	10	50	16	21	17
3	Bengkulu Utara	7	15	91	14	31	28
4	Kaur	5	11	29	3	20	19
5	Seluma	4	18	49	15	26	15
6	Mukomuko	6	11	29	6	19	11
7	Lebong	2	11	27	1	11	0
8	Kepahiang	6	8	31	14	11	11
9	Bengkulu Tengah	4	16	31	12	16	11
10	Kota Bengkulu	3	17	55	19	21	86
Jumlah		53	126	429	112	1950	1381

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

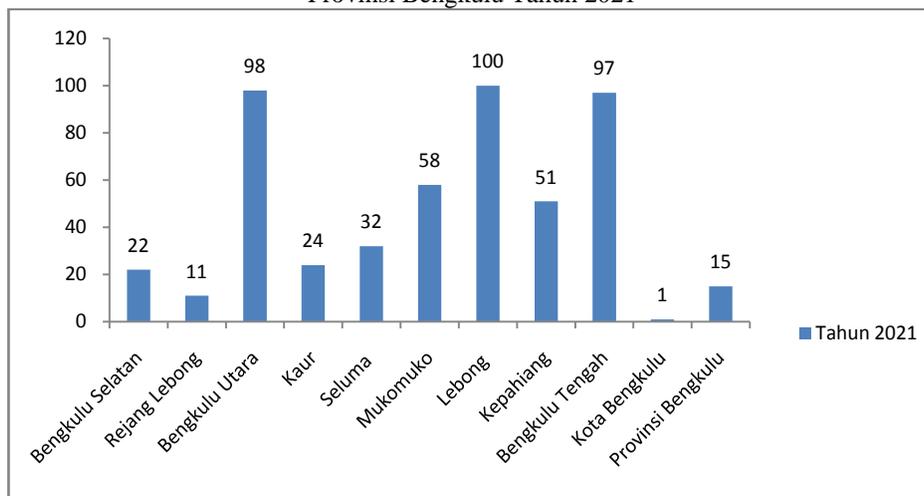
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS jumlahnya itu banyak sekali bisa sampai ratusan bahkan ribuan, namun secara garis besar dalam rumah tangga ada 10 yaitu: 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2. Memberi bayi ASI eksklusif; 3. Menimbang balita setiap bulan; 4. Menggunakan air bersih; 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6. Menggunakan jamban sehat; 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8. Makan buah dan sayur setiap hari; 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari; 10. Tidak merokok di dalam rumah.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah (arteri). Angka 140 mmHG merujuk pada bacaan sistolik, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun

ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan, kesehatan dan Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat. Jumlah estimasi penderita ≥ 15 tahun hipertensi di Provinsi Bengkulu tahun 2021 secara estimasi mencapai 524.184 orang, mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 79,484 orang (19%), secara rinci dapat dilihat di grafik di bawah ini:

Grafik 2.21
Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Provinsi Bengkulu Tahun 2021

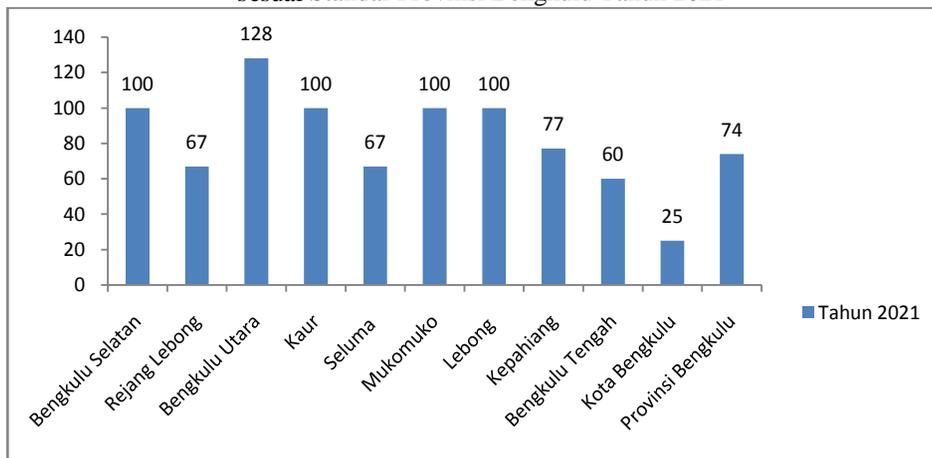


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Persentase Penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999). di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 jumlah penderita DM sebanyak 18.453 orang, dan 13.627 (74%) mendapat pelayanan sesuai standar, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.22
Persentase Penderita Diabetes Mellitus (DM) Mendapat Pelayanan Kesehatan
sesuai Standar Provinsi Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Kesehatan Lingkungan

Persentase Sarana Air Minum Dengan Risiko Rendah + Sedang

Sarana air minum meliputi sarana air minum dengan jaringan perpipaan dan sarana air minum bukan jaringan perpipaan yang berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air atau bangunan perlindungan mata air dan depot air minum. Pada tahun 2021 di Provinsi Bengkulu jumlah sarana air minum dengan Risiko Rendah + Sedang sebesar 407 (74%) dari 550 jumlah sarana air minum yang ada pada tabel berikut

Tabel 2.12
Persentase Sarana Air Minum Yang dilakukan Pengawasan
Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SARANA AIR MINUM	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL)				PEMERIKSAAN			
			JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DENGAN RENDAH + SEDANG	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT	%
1	BENGKULU SELATAN	97	97	100	30	31	31	32	30	97
2	REJANG LEBONG	75	75	100	75	100	75	100	63	84
3	BENGKULU UTARA	61	60	98	60	100	60	98	60	100
4	KAUR	81	80	99	26	33	26	32	26	100
5	SELUMA	47	47	100	47	100	47	100	47	100
6	MUKOMUKO	48	42	88	42	100	42	88	42	100
7	LEBONG	48	15	31	15	100	15	31	7	47
8	KEPAHIANG	84	81	96	81	100	81	96	81	100
9	BENGKULU TENGAH	52	52	100	30	58	30	58	30	100
10	KOTA BENGKULU	1	1	100	1	100	1	100	1	100
JUMLAH (KAB/KOTA)		594	550	93	407	74	408	69	387	95

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat

Kualitas air minum yang memenuhi syarat adalah kualitas air minum yang memenuhi syarat secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan Penyelenggara air minum adalah Badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum, tidak termasuk air kemasan, depot air minum isi ulang, penjual air keliling, dan pengelola tangki air. Tahun 2021 di Provinsi Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan air bersih sebanyak 408 dari sebanyak 594 jumlah sarana air minum yang ada, dan yang memenuhi syarat sebanyak 387 (95%).

Persentase Penduduk Dengan Akses Terhadap Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)

Sanitasi Layak adalah fasilitas pembuangan tinja (jamban) yang digunakan sendiri atau bersama, yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, dilengkapi dengan, tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dengan kloset leher angsa atau tidak leher angsa yang tertutup dan pembuangan akhir tidak mencemari sumber air/tanah. Dari 571.803 jumlah KK di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021, Keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak yang digunakan adalah: Komunal sebanyak 24.978, JSS 101.133 dan JSP sebanyak 385.629. Penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 511.740 (89%). Rincian Jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak selengkapnya dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.13
Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)
Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	BENGKULU SELATAN	45.200	3.175	3.175	11.568	11.568	24.306	24.306	39.049	86
2	REJANG LEBONG	74.234	3.440	3.440	6.166	6.166	56.115	56.115	65.721	89
3	BENGKULU UTARA	83.445	5.267	5.267	14.087	14.087	54.601	54.601	73.955	89
4	KAUR	35.414	1.805	1.805	12.192	12.192	15.211	15.211	29.208	82
5	SELUMA	59.513	744	744	19.935	19.935	30.496	30.496	51.175	86
6	MUKOMUKO	50.297	2.850	2.850	5.813	5.813	37.766	37.766	46.429	92
7	LEBONG	30.069	775	775	3.099	3.099	17.238	17.238	21.112	70
8	KEPAHIANG	44.166	2.754	2.754	16.113	16.113	21.583	21.583	40.450	92
9	BENGKULU TENGAH	31.501	2.668	2.668	9.379	9.379	15.165	15.165	27.212	86
10	KOTA BENGKULU	117.964	1.500	1.500	2.781	2.781	113.148	113.148	117.429	100
JUMLAH PROVINSI		571.803	24.978	24.978	101.133	101.133	385.629	385.629	511.740	89

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Persentase Desa STBM

Pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Desa yang sudah melakukan pemucuan minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja masyarakat/Natural Leader, dan telah mempunyai rencana tindak lanjut untuk menuju Sanitasi Total.

Desa yang telah mencapai 100% penduduk melaksanakan 5 pilar maka desa tersebut dapat dikategorikan Desa STBM. Desa yang penduduknya 100% mengakses jamban sehat maka desa tersebut dapat dikatakan Desa Stop BABS (SBS). Tahun 2020 dari 1.513 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu desa yang sudah melaksanakan STBM sebanyak 1.288 (85%), Desa Stop BABS sebanyak 559 (37%) dan Desa STBM sebanyak 205 (14%). Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Desa yang Melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
			DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BENGKULU SELATAN	158	141	89	72	45,6	14	9
2	REJANG LEBONG	156	139	89	69	44,2	1	1
3	BENGKULU UTARA	219	223	102	62	28,3	0	0
4	KAUR	193	140	73	51	26,4	99	51
5	SELUMA	202	132	65	51	25,2	80	40
6	MUKOMUKO	151	151	100	66	43,7	0	0
7	LEBONG	104	104	100	12	11,5	0	0
8	KEPAHIANG	119	90	76	60	50,4	0	0
9	BENGKULU TENGAH	144	101	70	49	34,0	0	0
10	KOTA BENGKULU	67	67	100	67	100,0	11	16
JUMLAH PROVINSI		1.513	1.288	85	559	36,9	205	14

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Persentase Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan

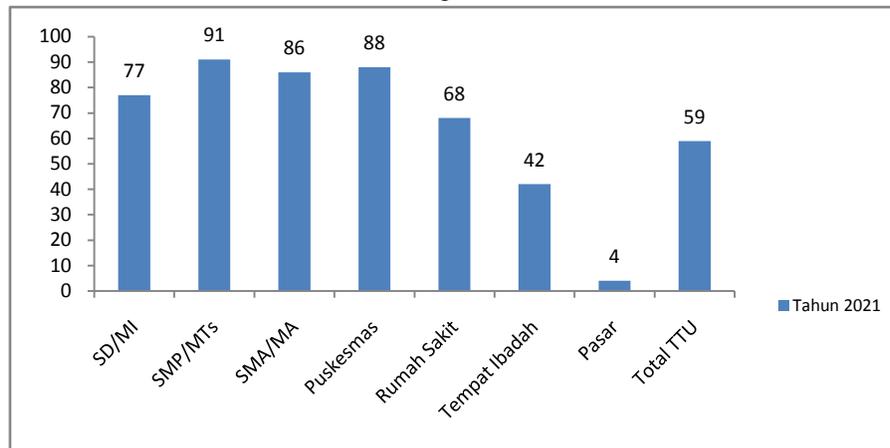
Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang meliputi: sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas), sarana sekolah (SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA), Tempat Ibadah dan Pasar. Di Provinsi Bengkulu tahun 2021, TTU yang ada berjumlah 4.995, dengan rincian: sarana pendidikan terdiri dari, SD 1.345, SLTP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

413, SLTA 188, sarana kesehatan: Puskesmas 179 buah, Rumah Sakit 25 buah, tempat ibadah 2.399 buah, pasar 146 dan yang memenuhi syarat sebanyak 2.762 (59%), yang terdiri dari Sarana Pendidikan dengan rincian : SD sebanyak 1.037 (77%), SLTP 374 (91%), SLTA 162 (86%), Sarana Kesehatan dengan rincian: Puskesmas 158 (88%), Rumah Sakit Umum 17 (68%), Tempat Ibadah 1008 (42%) dan Pasar 6 (4%). selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.23
Persentase Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat
di Provinsi Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

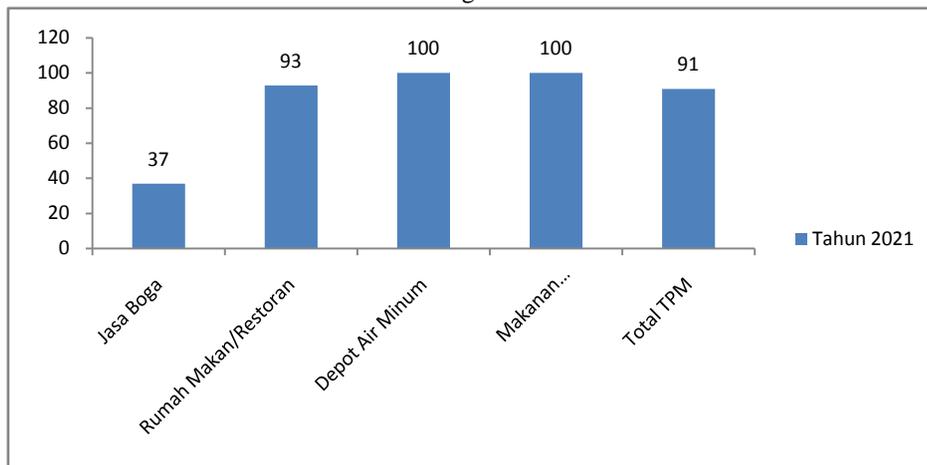
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan

Usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. TPM yang terdaftar yang tercatat di wilayah kerja puskesmas atau kantor kesehatan pelabuhan dan didukung dengan aspek legal hukum baik yang memenuhi persyaratan maupun yang tidak memenuhi persyaratan *higienis* sanitasi usaha atau kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan. Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunannya yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi masyarakat umum ditempat usahanya. Usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Di Provinsi Bengkulu, TPM yang ada berjumlah 254 yang terdiri dari: Jasa Boga 30, Rumah Makan/Restoran 61, Depot Air Minum 44, dan Makanan Jajanan/Kantin/Sentra Makan jajanan 119, dan yang memenuhi syarat sebanyak 231 (91%) dengan rincian: Jasa Boga 11 (37%), Rumah Makan/Restoran 57 (93%), Depot Air Minum 44 (100%), dan

Makanan Jajanan/Kantin/Sentra Makan jajanan 119 (100%). selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.24
Persentase Tempat Pengeloaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat
Di Provinsi Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2021

Dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu

Pandemi COVID-19 di Bengkulu memiliki dampak sangat luas di berbagai sektor (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi kerentanan sosial (*social vulnerability*) akibat pandemi ini menyebabkan ketahanan keluarga dan masyarakat mengalami penurunan sehingga produktivitas menurun, mata pemcaharian terganggu, serta munculnya kepanikan sosial di tengah masyarakat. Dampak Covid-19 juga mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan *social/physical distancing*.

2.3. Tantangan

1. Ketersediaan Pangan :

- a. Dampak perubahan iklim global, Dalam beberapa tahun terakhir ini, kejadian iklim ekstrem di Indonesia khususnya di Bengkulu terasa lebih nyata. Pola dan intensitas curah hujan yang berbeda dari sebelumnya, kenaikan temperatur udara, banjir dan kekeringan yang semakin terjadi, dan intensitas serangan hama serta penyakit yang semakin tinggi, merupakan beberapa gejala perubahan iklim yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan.
- b. Provinsi Bengkulu belum memiliki Perda LP2B karena masih menunggu Perda LP2B Kabupaten/Kota

- c. Pertanian di Provinsi Bengkulu dicirikan atau didominasi oleh usaha tani skala kecil, Petani kecil ini dihadapkan pada persoalan klasik yang belum berhasil diatasi dengan baik, seperti keterbatasan akses terhadap pasar, pemodal, informasi dan teknologi. Bila tidak ada inovasi baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan sangat berat bagi Provinsi Bengkulu untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.
 - d. Terbatasnya cadangan pangan daerah
2. Keterjangkauan
- a. Adanya ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah., ketidakseimbangan ini akan menyebabkan tingginya ongkos distribusi pangan dan pemerataan pangan sehingga mempersulit penyediaan pangan secara merata ke seluruh daerah di Provinsi Bengkulu.
 - b. Pandemi COVID-19 di Bengkulu memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID
 - c. Dampak Covid-19 terbesar adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan *social/physical distancing*.
3. Pemanfaatan
- a. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras
 - b. Masih tingginya konsumsi beras masyarakat Provinsi Bengkulu.
 - c. Masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur-sayuran dan buah.
 - d. Keamanan dan mutu pangan belum terjamin sepenuhnya.
4. Kelembagaan
- a. Keberlanjutan komitmen kepala daerah terkait program pembangunan yang mendukung pangan dan gizi
 - b. Masih minimnya pelibatan sektor non pemerintah di bidang pangan dan gizi

2.4 Telaah Kebijakan Provinsi

Dibalik tantangan yang ada untuk mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu membuka suatu potensi atau peluang baik bagi pemerintah maupun dari masyarakat. Arahannya pola pemanfaatan ruang untuk kawasan Tanaman Pangan, sesuai dengan Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu tahun 2012-2030. Arahannya kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering (ladang) seperti: jagung, kedelai, dan sayuran (kacang panjang, kacang hijau, bayam, cabe, dll) adalah sekitar 212.290,38 Ha.

- a. Program pengembangan kawasan pertanian lahan basah, yaitu : di Daerah Irigasi Bendung Muko-Muko Kiri dan Bendung Air Majunto di Kabupaten Muko-Muko, - bendung Air Kesubun dan bendung Air Lais Kurotidur di Kabupaten Bengkulu Utara, bendung Air Seluma di Kabupaten Seluma, bendung Air Selebang, Kedurang di Kabupaten Bengkulu Selatan dan bendung Batutegei dan bendung Way Rarem di Kabupaten Kaur.
- b. Peningkatan produktivitas lahan padi sawah yang ada di Provinsi Bengkulu
- c. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan; dan
- d. Pengembangan kawasan integrasi pertanian peternakan.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sangat erat kaitannya dalam upaya membangun ketahanan pangan masyarakat. Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan dengan upaya mengantisipasi terjadinya : (1) konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, (2) menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, (3) ketersediaan air yang semakin terbatas akibat adanya kerusakan hutan, persaingan dengan industri dan pemukiman, (4) penggunaan lahan yang belum optimal.

Pemerintah lewat wewenangnya dapat mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Dimulai dari menyejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas seperti misalnya bantuan relaksasi kredit kepada para petani miskin. Fasilitas pembiayaan petani melalui KUR dan asuransi pertanian. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan dimasa pandemi seperti ini. Petani juga bisa diberi fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran melalui program BUMITANI (Badan Usaha Milik Petani). Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali untuk membangun nasionalisme. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi- potensi pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga pangan, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada.

Masyarakat memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengakali situasi yang ada. Termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri seperti misalnya *urban farming* dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah.

Pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan termuat pada Program **Prioritas Pembangunan Daerah 3** yaitu **Penguatan ketahanan dan Transformasi Ekonomi**, yang salah satunya adalah **Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan**. Dalam mendukung 18 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan. Selain itu pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan yaitu Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat yang berada di desa yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama sebagai cadangan pangan saat terjadinya kerawanan pangan transien maupun kronis.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki Program Unggulan yaitu **Desa Pangan Lestari** yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pangan dan gizi dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Desa Pangan Lestari merupakan Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan Pekarangan dan lahan tidur desa/lahan yang belum digarap masyarakat desa oleh Kelompok Wanita Tani/Kelompok Tani. Kegiatan ini mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan/lahan tidur/lahan yang belum di garap yang dimiliki masyarakat desa secara optimal untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga menuju kemandirian pangan.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk “Pemulihan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi, pemenuhan dan

*Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu
Tahun 2022-2024*

pemerataan infrastruktur dasar dan strategis”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemulihan ekonomi daerah;
- b. Penanganan kemiskinan;
- c. Penyediaan akses dan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- d. Pengurangan Penggangguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM;
- e. Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah;
- f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi perwujudan ketahanan pangan;
- g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih;

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan Bengkulu Maju melalui Pemantapan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan pemerataan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur strategis”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
- c. Penyediaan akses dan Pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
- d. Percepatan Pengurangan Penggangguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan kapasitas SDM
- e. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Startegis Daerah dalam rangka peningkatan Konektivitas Daerah
- f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan industri hilirisasi
- g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan pada “Pemantapan Bengkulu Maju menuju Bengkulu Sejahtera melalui Pemerataan dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Percepatan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan daerah dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
- b. Penguatan Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
- c. Peningkatan Penyediaan akses dan Pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- d. Peningkatan Percepatan Pengurangan Pengangguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing SDM;
- e. Peningkatan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Startegis Daerah dalam rangka peningkatan Konektivitas Daerah;
- f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas industri hilirisasi;
- g. Peningkatan dan Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih.

BAB III RENCANA AKSI MULTI SEKTOR

3.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Penyusunan RAD-PG

Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PG 2022-2024 adalah:

1. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMN 2020-2024 dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sedangkan sasaran atau outcome yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Outcome RAD-PG Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

No	Indikator	Baseline (2021)	Target			
			2022	2023	2024	Instansi Penanggung-jawab
Outcome Antara						
1.	Ketersediaan Beras (ton)	195.852	215.439	236.982	260.680	Dinas Ketahanan Pangan
2.	Ketersediaan Pangan Hewani (ton)	530.794	557.333	585.199	614.450	Dinas Ketahanan Pangan
3.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	82,50	83,0	83,5	84,0	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3.254	2.400	2.400	2.400	Dinas Ketahanan Pangan
5.	Ketersediaan Protein (gram/kapita/ hari)	121	63	63	63	Dinas Ketahanan Pangan
6.	Jumlah kecamatan rawan pangan (kecamatan)	9	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

7.	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	46.20	57.89	60.79	63.69	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	9.5	9.8	10	10.2	Dinas Peternakan dan Keswan
9.	Konsumsi telur (gram/kapita/hari)	40	40.2	40.6	42	Dinas Peternakan dan Keswan
10.	Konsumsi susu (gram/kapita/hari)	32.3	32.8	33.4	33.6	Dinas Peternakan dan Keswan
11.	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	277,5	262	262	262	Dinas Ketahanan Pangan
12.	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	87,0	88,5	90,0	91,5	BPOM
Outcome						
1.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,04*	6,35*	6,25*	6,15*	Dinkes
2.	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	5	7,5	7,3	7,0	Dinkes
3.	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun (%)	21,8	21,8	21,8	21,8	Dinkes

* *e-ppgbm*

b. Indikator Kunci RAD-PG yang ada dalam dokumen perencanaan daerah

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Adapun Indikator Kunci RAD-PG yang ada dalam dokumen perencanaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan
2. Prevalensi *stunting* pada balita (%)
3. Pravalensi Wasting pada Balita (%).

3.2. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah

Kebijakan terkait ketersediaan pangan dan akses pangan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan tersebut termuat pada Program **Prioritas Pembangunan Daerah 3** yaitu **Penguatan ketahanan dan Transformasi Ekonomi**, yang salah satunya adalah **Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan**. Selain itu, terkait ketahanan pangan, stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan atau permukiman telah mengancam kemandirian pangan Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sangat erat kaitannya dalam upaya membangun ketahanan pangan masyarakat. Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan dengan upaya mengantisipasi terjadinya : (1) konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, (2) menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, (3) ketersediaan air yang semakin terbatas akibat adanya kerusakan hutan, persaingan dengan industri dan permukiman, (4) penggunaan lahan yang belum optimal. Ketersediaan pangan sangat tergantung pada luas lahan pertanian yang ada, saat ini masalah yang dihadapi banyaknya alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan pertanian non pangan. Luas lahan sawah yang semakin berkurang berpengaruh terhadap produksi padi, dimana ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras masih sangat tinggi. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berbasis pada sumberdaya lokal.

Dalam mendukung 18 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan. Selain itu pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan yaitu Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat yang berada di desa yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama sebagai cadangan pangan saat terjadinya kerawanan pangan transien maupun kronis.

b. Kebijakan terkait gizi dan kesehatan masyarakat

- Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, terdiri dari Kegiatan: Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Terdiri dari Kegiatan : Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- Program Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari Kegiatan : Kegiatan Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kewenangan provinsi, Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari Kegiatan: Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerahkabupaten/kota.

c. **Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG**

Salah satu strategi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu yang terintegrasi dengan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah Pengarusutamaan Gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh pemerintahan untuk mengintegrasikan gender pada setiap

tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

Capaian pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu, dilihat dari indikator IPG dan IDG. IPG Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan 3 tahun terakhir dan mencapai 91 pada tahun 2020. Sedangkan IDG terus meningkat hingga menjadi 70,48 pada tahun 2020. Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Oleh karenanya, strategi percepatan PUG dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, strategi dalam PUG yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan komitmen pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif untuk melaksanakan PUG;
2. Mewujudkan kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan;
3. Membentuk kelembagaan PUG dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti

focal point, kelompok kerja, forum, dan tim;

4. Menyiapkan SDM dan sumber daya lainnya untuk pencapaian tujuan PUG;
5. Menyiapkan sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, yaitu data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang terkait gender tertentu;
6. Menyiapkan alat analisis gender untuk mengidentifikasi isu gender dan menyusun rencana, seperti: perencanaan, penganggaran dan pemantauan dan evaluasi;
7. Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah berupa partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Ketujuh strategi ini merupakan prasyarat yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Adanya komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, keterampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender.

BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

4.1. Strategi dan Aksi

Penyelenggaraan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan termuat pada Program **Prioritas Pembangunan Daerah 3** yaitu **Penguatan ketahanan dan Transformasi Ekonomi**, yang salah satunya adalah **Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan**

Pangan. Dalam mendukung 18 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu mempunyai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan. Selain itu pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan yaitu Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat yang berada di desa yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama sebagai cadangan pangan saat terjadinya kerawanan pangan transien maupun kronis.

Pencapaian Misi Pertama ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu : Pencapaian Misi Pertama ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan *Prioritas Pembangunan 3* : Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, yaitu :

1. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan;
2. Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi;
3. Peningkatan investasi;
4. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan

Misi Kedua ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu: Prioritas Pembangunan kedua, Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan, dengan Program Prioritas;

1. Peningkatan Ketahanan dan Kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim;
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Ketiga, yaitu Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, dengan Program Prioritas;

1. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan;
2. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan;

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun strategi dan aksi di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi:

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

Tabel 4.1
Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Tujuan Strategis 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	
Strategi	Aksi
1. Peningkatan produksi pangan yang beragam	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan b. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat c. Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
2. Peningkatan produksi pangan beragam	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam b. Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani dan pangan lokal di setiap kab/kota c. Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota d. Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan e. Memperkuat kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan f. Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan g. Meningkatkan mutu keamanan pangan pada sentra produksi Pangan
3. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses distribusi)	Meningkatkan keamanan mutu pangan pada Sarana Distribusi Pangan
4. Pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota b. Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
5. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi dan teknologi kepada petani, nelayan dan peternak terkait b. Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>
Tujuan Strategis 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	
Strategi	Aksi
1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan b. Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2. Perluasan akses sistem informasi dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
3. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/koperasi/BumDes dalam pengembangan industri Pangan Lokal (PIPL) untuk peningkatan Gizi Keluarga

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

4. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Revitalisasi/mengaktifkan program cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing. b. Mendampingi daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan c. Mengaktifkan kegiatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
5. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal b. Mendampingi daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan c. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa
Tujuan Strategis 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	
Strategi	Aksi
1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan sistem informasi padan dan gizi dalam rangka penguatan SKPG dan daerah beserta pemanfaatannya b. Meningkatkan keamanan pangan yang beredar
2. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan
3. Edukasi Pola Konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) sejak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggerakan Massa dalam rangka meningkatkan PHBS b. Pertemuan Komunikasi Antar Pribadi dalam percepatan pencegahan stunting c. Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku d. Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan e. Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman c. Meningkatkan pengetahuan komunitas pasar, pengelola dan pedagang pasar mengenai pangan aman d. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha UMKM mengenai tata cara mengurus no izin edar produk pangan e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sadar pangan(GEMA SAPA) f. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman
5. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita dan kelompok rentan rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggerakan Massa dalam rangka meningkatkan PHBS b. Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani
6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan MP-ASI berbasis pangan lokal	Membina kab/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif dan MP-ASI

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu

Tahun 2022-2024

7. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024 b. Pelatihan Gizi Bencana dan rencana kontigensi c. Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat d. Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM
Tujuan Strategis 4 : Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	
Strategi	Aksi
Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kegiatan Advokasi lintas sektor Keamanan Pangan Desa, Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Aman Berbasis Komunitas b. Meningkatkan kegiatan Advokasi dan pendampingan UMKM

4.2. Pengorganisasian

Untuk penanganan pangan, Provinsi Bengkulu membentuk Satgas Pangan yang melibatkan multisektor yang ada di Provinsi Bengkulu, begitu juga dengan kabupaten/kota juga membentuk Satgas dimasing-masing daerah, Satgas Pangan ini bertugas untuk mengendalikan dan menjaga kestabilan stok pangan dimasyarakat, baik dalam memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancar, sehingga stok pangan masyarakat tersedia.

Perangkat daerah provinsi dan instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan RAD-Panga Gizi di daerah adalah :

1. Bappeda Provinsi Bengkulu,
2. Perum Bulog Wilayah Bengkulu,
3. BPOM
4. Dinas Ketahanan Pangan,
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan,
6. Dinas Kesehatan, Peternakan dan Kesehatan Hewan,
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
8. Dinas Kelautan dan Perikanan,
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Satgas Pangan Provinsi Bengkulu ini bertugas untuk mengendalikan dan menjaga kestabilan stok pangan dimasyarakat melalui :

- Kebijakan yang perlu dilakukan oleh satgas, antara lain:

Satgas pangan daerah perlu mengoptimalkan pemantauan atas ketersediaan stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan dan mengantisipasi gejolak harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen dan mempertimbangkan jika perlu ada intervensi operasi pasar.

- Lokasi operasi pasar perlu mempertimbangkan kantong-kantong konsumen miskin dan industri yang mempekerjakan rakyat kecil, sehingga tepat sasaran
- Melakukan konsolidasi dan meningkatkan koordinasi dalam kerja sama antar daerah untuk memenuhi komoditas pangan serta memperkuat peran BUMD Pangan dalam pemenuhan ketersediaan dan akses distribusi pangan daerah.
- Melakukan penguatan tata kelola rantai pasok dan penanganan pasca panen dengan memperhatikan sistem pergudangan untuk mempertahankan kualitas dan menghindari kerusakan/kehilangan hasil panen.
- Mendorong pengembangan lembaga distribusi pangan, seperti Pasar Mitra Tani (PMT) atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC), untuk dapat menyerap hasil produksi bahan pangan lokal sebagai upaya mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan berbasis sumber daya lokal

4.3. Pembiayaan

Penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besaran dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD, Renstra OPD, serta rencana pendanaan sumber lain.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi penajaman dalam RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pelaporan. Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Secara teknis ruang lingkup kegiatan pemantauan RAD-PG dapat dibagi menjadi empat yaitu: substansi, pelaksana, waktu, dan umpan balik hasil.

1. Substansi pemantauan

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi pemantauan adalah:

- a) Strategi, aksi, dan indikator (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi
- b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut dapat menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi. Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan juga dapat diperluas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra percepatan perbaikan gizi (non-pemerintah).

2. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan instansi lainnya yang dikoordinir oleh Bappeda.

3. Waktu pemantauan

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun yakni pada pertengahan dan akhir tahun.

4. Umpan balik

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan penyesuaian dan pembelajaran untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah kegiatan pemantauan dilakukan.

b. Evaluasi

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dilakukan terhadap Strategi, Aksi, dan capaian indikatornya beserta proses pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD-PG Tahun 2022-2024.

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator *masukan*, proses, dan *keluaran*. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator *dampak*. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

Waktu pelaksanaan *evaluasi* dapat dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (12 indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 indikator pembangunan bidang gizi).

5.2. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh Bappeda. Pemantauan dan evaluasi dimulai sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

5.3 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD dan instansi terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

1. Indikator dan capaian masing-masing OPD dan instansi terkait dalam mendukung strategi dan aksi
2. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
3. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya

BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan daerah di bidang pangan dan Gizi. RAD-PG Provinsi Bengkulu disusun mendukung pencapaian Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2021-2024. Dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan, perlu dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, elit politik, dunia usaha, mitra non pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penyusunan Dokumen RAD-PG Provinsi Bengkulu tahun 2022-2024, dapat diambil beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. RAD-PG disusun secara bersama-sama oleh Bappeda Provinsi dengan OPD teknis terkait dan instansi vertikal serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
2. RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah dan kabupaten/kotamulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.
3. RAD-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:
 - a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA;
 - b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
 - c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
 - d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.
4. Perlu dilakukan upaya monitoring dan evaluasi secara periodik agar diperoleh data dan hasil yang lebih akurat.
5. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah.

Implementasi RAD-PG ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor, program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai

*Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu
Tahun 2022-2024*

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan gizi di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

BPS Provinsi Bengkulu (2022). Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (2022). Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2022

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022 - 2024

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
TUJUAN STRATEGIS 1 : PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN												
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan Tahap Penumbuhan (Klp)	Kelompok	23	500,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	dokumen			18	300,000,000	18	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pupuk Subsidi yang tersalur	Ton	70,540	4,100,000,000	70,540	2,600,000,000	70,540	2,750,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBD)
				Jumlah Alsintan yang diadakan	Unit	1,000		500		500		
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat Benih	Sertifikat	1	27,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBD)
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih Padi dan Palawija yang disalurkan	Ton	14	165,000,000	14	200,000,000	14	200,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBD)
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Padi dan Jagung yang difasilitasi	Ha	-	-	100	100,000,000	100	110,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBD)

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Prasarana Bidang Pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup	Pembangunan, Peningkatan, Rehab Sarana pengairan	unit	14	8,676,000,000	14	8,676,000,000	14	8,676,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBN-Tugas perbantuan)
				Pembangunan, Peningkatan, Rehab Irigasi tersier	Unit	95		95		95		
			Sarana pengembangan kawasan Pertanian	Optimasi Lahan rawa	Km	65	2,910,925,000	65	2,910,925,000	65	2,910,925,000	
			Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Penyusunan e-RDCK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Orang	57854	1,487,870,000	57854	1,487,870,000	57854	1,487,870,000	
			Sarana Pengembangan Kawasan	Area Penyaluran Benih Padi	Unit	11000	3,463,750,000	11000	3,810,125,000	11000	4,191,137,500	
			(Tanaman Pangan)	Area Penyaluran Benih Jagung	Unit	11000		11000		11000		
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Tanaman Pangan)	Sarana Pengolahan dan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	22	1,103,395,000	22	1,213,734,500	22	1,335,107,950	
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani dan pangan lokal disetiap kab/kota	Peningkatan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Hortikultura	Jumlah Penyaluran benih Hortikultura	Batang	41,910	1,800,000,000	2,000	200,000,000	2,000	200,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBD)

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Peningkatan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih/bibit Perkebunan	Jumlah Penyaluran benih Perkebunan	Batang	-	-	1,000	150,000,000	1,000	150,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBD)
			Sarana Pengembangan Kawasan (Hortikultura)	Penyaluran benih bawang merah dan benih bawang putih	Unit	41	1,854,100,000	20	900,000,000	20	900,000,000	DINAS TPHP PROVINSI BENGKULU (APBN-Dekonsentrasi)
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan	Jumlah Benih Unggul yang digunakan	Ekor	-	-	-	-	1500	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
			Pelatihan kelompok untuk POKDAKAN	Jumlah pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan	Kegiatan	-	-	-	-	1	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah pelatihan untuk pembuatan pakan ikan	Kegiatan	-	-	-	-	1	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Pengadaan Benih/bibit ternak yang sumbernya dari provinsi lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	ekor	229	3,200,000,000	177	2,488,825,000	178	2,518,650,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang dibina	dokumen	2	22,000,000	2	22,000,000	2	22,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Kali	-	-	1	15,000,000	2	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan	Unit Usaha	-	-	10	15,000,000	10	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	sertifikat	4	22,000,000	5	33,000,000	5	33,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
			Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			1	15,000,000	1	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	dokumen			1	10,000,000	1	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar	dokumen			2	20,000,000	2	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	dokumen	1	95000000	1	100,000,000	1	110,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatkan mutu keamanan pangan pada sentra produksi Pangan	Pengawasan Rutin Sarana Produksi Pangan di Kota dan Kabupaten	Sarana produksi pangan yang memenuhi syarat	Jumlah Sarana produksi	60 sarana	41,299,000	60 sarana	41,299,000	60 sarana	41,299,000	BPOM

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses distribusi)	Meningkatkan keamanan mutu pangan pada Sarana Distribusi Pangan	Pengawasan Rutin Sarana Distribusi obat dan Makanan di Kota dan Kabupaten	Sarana Distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat	Jumlah Sarana Distribusi	450 sarana	461,289,000	450 sarana	461,289,000	450 sarana	461,289,000	BPOM
1	Pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten/kota	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah	Jumlah cadangan pangan yang diadakan (Ton)	ton	7.5	100,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dokumen			1	100,000,000	1	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/ kabupaten/ kota	Pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Pangan Beras Medium (KPSH-BM)	Stabilisasi Harga Beras Medium	Kuantum (Kg)	3,500,000	38,006,500,000	3,500,000	38,006,500,000	3,500,000	38,006,500,000	Perum BULOG
		Membangun lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Penyediaan Infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	unit	1	155,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit			2	310,000,000	2	310,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi dan teknologi kepada petani, nelayan dan peternak terkait	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan mesin kapal, alat tangkap	Jenis	2	2,390,184,000	2	670,000,000	2	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah GPS dan fish finder, jumlah nelayan pemilik kapal yang menerima bantuan	Unit	10	100,000,000	6	75,000,000	10	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	-	-	8	745,000,000	12	900,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan, jumlah praktek penggunaan API yang dilakukan	Kali	-	-	-	-	1	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia (LPPMHP)	Dokumen/kali	2	13,000,000					Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	-	-	5	25,000,000	5	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
			Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Penyediaan	Dokumen	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	Dokumen	1	513,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
				Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	40,000,000	1	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
Tujuan Strategis 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman												
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	dokumen	1						Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen			1	15,000,000	1	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Memfaatkan panel harga pangan sebagai Early Warning System (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Pemantauan harga dan ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistim informasi Perdagangan	Jumlah pemuktahiran data Barang Kebutuhan Pokok	Dokumen	0	0	12	30,000,000	12	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

N O	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Pemantauan harga dan ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistim informasi Perdagangan									

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	Kali	6	160,000,000	6	200,000,000	6	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Fasilitasi Ditribusi Pangan melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang diberikan	TTIC	1	100,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	unit			1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.2	Perluasan akses sistem informasi dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1	40,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan			1	25,000,000	1	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan peningkatan mutu	Pembinaan/pendampingan peningkatan mutu	Jumlah informasi produk unggulan	produk	3	65,000,000	3	7,000,000	3	75,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/koperasi/Bu mDes dalam pengembangan industri Pangan Lokal (PIPL) untuk peningkatan Gizi Keluarga	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah IKM dan sentra yang berpotensi yang dibina	sentra	4	400,000,000	5	400,000,000	6	400,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
		Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal(PIPL) untuk peningkatan gizi pokok rawan	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan yang di fasilitasi	Kelompok	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
					Kelompok/ unit usaha	10	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Kab/Kota	9	0	9	150,000,000	9	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
2	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/mengaktifkan program cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing.	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah	Jumlah cadangan pangan yang diadakan (Ton)	ton	7.5	100,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan pengadaan,	Jumlah Pengadaan,	dokumen			1	100,000,000	1	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Mendampingi daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Jumlah dokumen penanganan kerawanan pangan provinsi (dok)	dokumen	1	25,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	dokumen			1	25,000,000	1	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Mengaktifkan kegiatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	Penyaluran beras untuk keadaan Darurat Bencana	Tersalurnya beras sesuai dengan Pagu Provinsi (200.000 Kg) dan Kabupaten/ Kota (100.000 Kg)	Kuantum (Kg)	1,200,000	13,030,800,000	1,200,000	13,030,800,000	1,200,000	13,030,800,000	Perum BULOG
3	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Promosi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah promosi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilaksanakan	kali	2	34,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Promosi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dokumen			2	40,000,000	2	34,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Mendampingi daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 dalam pembangunan ketahanan pangan	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Jumlah dokumen penanganan kerawanan pangan provinsi	dokumen	1	25,000,000					Dinas Ketahanan Pangan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	dokumen			1	25,000,000	1	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan kemandirian masyarakat desa	Membentuk kader dan komunitas desa pangan aman	Jumlah desa yang telah diintervensi	Desa	18	922,874,000	25	935,000,000	32	950,000,000	BPOM
Tujuan Strategis 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)												
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	mengintegrasikan sistem informasi padan dan gizi dalam rangka penguatan SKPG dan daerah beserta pemanfaatannya	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Gizi masyarakat	Dokumen	17	35,000,000	17	75,000,000	17	100,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	35	35,000,000	35	100000	35	125000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan kemandirian pangan	pengujian sampel makanan	hasil pengujian sampel makanan	item sampel	397	99,250,000	397	99,250,000	397	99,250,000	BPOM
		Meningkatkan keamanan pangan	Pengujian sampel takiiil	Hasil pengujian sampel takiiil	item sampel	350	2,800,000	350	2,800,000	350	2,800,000	BPOM
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten kota	Jumlah dokumen peta pemutakhiran daerah rentan rawan pangan yang disusun sampai tingkat kecamatan	dokumen	-	-					Dinas Ketahanan Pangan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	dokumen			1	40,000,000	1	47,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
3.3	Edukasi Pola Konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) sejak usia dini	Penggerakan Massa dalam rangka meningkatkan PHBS	Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan promosi	Dokumen	3	40,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Pertemuan Komunikasi Antar Pribadi dlm percepatan pencegahan stunting	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Gizi masyarakat	Dokumen	1	62,080,000	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Melakukan kerjasama dengan influencer tokoh	Pengelolaan Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	1	27,500,000	1	40,000,000	1	40,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan	Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah advokasi, edukasi, sosialisasi konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan	kali	1	25,000,000					Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	laporan			1	25,000,000	1	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Safari Gemarikan	Jumlah Promosi	Promosi	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (APBN)
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa KPM untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Kab/Kota	9	0	9	150,000,000	9	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Melakukan Evaluasi kinerja KPM dalam meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Kab/Kota	9	0	9	150,000,000	9	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	Kab/Kota	10	2,000,000,000	10	2,000,000,000	10	2,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan peran Pokjanal Posyandu dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Kab/Kota	10	-	10	150,000,000	10	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab/Kota	10	0	10	150,000,000	10	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Pengelolaan Layanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	27,500,000	1	40,000,000	1	40,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Pengujian laboratorium kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	dokumen	1	95,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Penyebaran Informasi obat dan makanan yang aman	pengadaan bahan promosi obat dan makanan yang aman	Paket	3	32,700,000	3	32,700,000	3	32,700,000	BPOM
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan komunitas	Kampanye Pasar Aman Berbasis Komunitas	Jumlah pasar aman yang telah	pasar	5	21,750,000	5	21,750,000	5	21,750,000	BPOM
		Meningkatnya pengetahuan komunitas pasar, pengelola dan pedagang pasar mengenai pangan aman	Bimtek pengelola pasar dan pedagang pasar	petugas pasar yang diintervensi	2 orang pengelola pasar yang diintervensi dan 40 orang pedagang pasar	3	64,381,000	3	64,381,000	3	64,381,000	BPOM
		Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha UMKM mengenai tata cara mengurus no izin edar produk pangan	Bimtek E Registrasi Pangan Olahan	Jumlah pelaku usaha pangan yang ingin mendaftarkan izin edar ke BPOM	Pelaku usaha	30	1,850,000	30	1,850,000	30	1,850,000	BPOM

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Talkshow gerakan masyarakat sadar pangan	talkshow	talkshow	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	BPOM
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman	KIE bersama tokoh masyarakat anggota komisi IX DRP RI	KIE dengan tokoh masyarakat Elva Hartati di kabupaten dan kota Bengkulu	Lokasi	4	1,823,040,000	17	1,823,040,000	17	1,823,040,000	BPOM
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama	Penggerakan Massa dalam rangka meningkatkan PHBS	Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan promosi	Dokumen	3	40,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Pengadaan Benih/bibit ternak yang sumbernya dari provinsi lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	ekor	229	3,200,000,000	177	2,488,825,000	178	2,518,650,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan MP-ASI berbasis pangan lokal	Membina kab/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif dan MP-ASI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	35	35,000,000	35	100000	35	125000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3.7	Peningkatan Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Gizi masyarakat	Dokumen	17	35,000,000	17	75,000,000	17	100,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Pelatihan Gizi Bencana dan rencana kontigensi	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Gizi masyarakat	Dokumen	1	75,080,000	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

N O	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	2,039,182	28,005,000,000	2,039,182	750,000,000	2,039,182	250,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,039,182	27,500,000	2,039,182	100,000,000	2,039,182	100,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
			Upaya Pengurangan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	35,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
			Pengelolaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil	Dokumen	-	-	9	5,000,000	9	75,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	75,000,000	10	150,000,000	10	200,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	26,250,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
			Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	-	-	1	25,000,000	1	25,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Tujuan Strategis 4 : Tujuan Strategis : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi												
4	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan kegiatan Advokasi lintas sektor Keamanan Pangan Desa, Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Aman Berbasis Komunitas	Advokasi lintas sektor program nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten	Kabupaten yang telah di tentukan sesuai hasil survey	kabupaten sesuai hasil survey	2	41,680,000	2	41,680,000	2	41,680,000	BPOM
		Meningkatkan kegiatan Advokasi dan pendampingan UMKM	Pendampingan UMKM dalam pengurusan No izin Edar Produk UMKM	Pelaku Usaha yang akan mengajukan izin edar produk	UMKM di Provinsi Bengkulu	17	46,824,000	17	46,824,000	17	46,824,000	BPOM
4	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	-	-	1	18,000,000	1	10,000,000	DPPPAPKKB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	-	1	18,000,000	1	23,000,000	DPPPAPKKB

NO	STRATEGI	AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						OPD/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga			-	-	1	10,000,000	DPPPAPPKB
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	22,000,000	30	23,000,000	25	17,000,000	DPPPAPPKB
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Dokumen Komunikasi	Dokumen	0	0	0	0	2	10,000,000	DPPPAPPKB



**BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022**